

**Panduan Sinkronisasi**

# **Bidang Keahlian Di SMK Dengan Prioritas Potensi Unggulan Wilayah dan Tenaga Kerja**



# **Panduan Sinkronisasi Bidang Keahlian Di SMK Dengan Prioritas Potensi Unggulan Wilayah Dan Tenaga Kerja**



**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

# Panduan Sinkronisasi Bidang Keahlian Di SMK Dengan Prioritas Potensi Unggulan Wilayah Dan Tenaga Kerja

Copyright ©2017 . Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

<b>Pengarah</b>	Dr. Thamrin Kasman
<b>Penanggung Jawab</b>	Arie Wibowo Khurniawan, S.Si, M.Ak.
<b>Ketua</b>	Chrismi Widjajanti, SE, MBA.
<b>Tim Penyusun</b>	Prof. Dr. Amat Mukhadis, M.Pd. Andika Bagus Nur Rahma Putra, M.Pd. Ahmad Mursyidun Nidhom, M.Pd. Dr. Ahmad Dardiri, M.Pd. Dr. Hary Suswanto, S.T., M.T.
<b>Penyunting Akhir</b>	Tri Haryani, S.Pd Yuli Setiawan, S.Ab Mohamad Herdyka, ST, M.Kom
<b>Desain Tata Letak</b>	Karin Faizah Tauristy, S.Ds Rayi Citha Dwisendy, S.Ds
<b>Desain Laman Sampul</b>	Ari

**ISBN** 978-602-5517-25-9

**Penerbit**

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI  
Gedung E Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,  
Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera,

Menindaklanjuti Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjadikan Inpres tersebut sebagai momentum untuk meletakkan fundamental pendidikan kejuruan di Indonesia. Inpres tersebut juga telah memberikan penegasan akan pentingnya Sekolah Menengah Kejuruan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dan berkarakter agar dapat mengisi ruang-ruang pembangunan dan mendorong percepatan kemajuan Indonesia. Melalui Revitalisasi SMK diharapkan dapat menciptakan generasi penduduk usia produktif yang memiliki kompetensi keterampilan atau keahlian siap pakai yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri. Dengan mencetak generasi yang unggul dan produktif nantinya diharapkan dapat memastikan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dapat tercapai.

Selain berpacu dalam meningkatkan kualitas peserta didik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga terus berupaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik, karena ini juga menjadi pondasi untuk kualitas pendidikan kejuruan yang baik.

Melalui Revitalisasi ini kita harus bisa menuntaskan apa yang diamanatkan oleh pemerintah yaitu membalik piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas berpendidikan SD dan SMP menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi melalui Sekolah Menengah Kejuruan.

Revitalisasi SMK ini dapat dijadikan salah satu solusi untuk mencetak peserta didik yang modern, bermartabat, inovatif, dan kreatif. Saya sangat mengapresiasi buku ini yang sudah menjelaskan tentang bagaimana Revitalisasi SMK yang sudah dilakukan dengan langkah nyata dan ditandai dengan progres yang baik dari upaya merevitalisasi SMK tersebut.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam upaya peningkatan kualitas bagi Sekolah Menengah Kejuruan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 2017



Dr. Thamrin Kasman

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur Pembinaan SMK.....	iii
BAB I .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum.....	5
C. Tujuan .....	6
D. Ruang lingkup .....	6
E. Analisis Kesenjangan.....	6
BAB II .....	11
A. Lanscape Prioritas Potensi Unggulan Wilayah, Tenaga Kerja, dan Bidang Keahlian Di SMK .....	11
B. Kerangka Acuan Pelaksanaan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK.....	41
BAB III .....	53
A. Konsorsium dan Mekanisme Kerja Penyelenggaraan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK.....	53
B. Konsorsium dan Mekanisme Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK.....	55
BAB IV .....	61
A. Analisis dan Penetapan Prioritas Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK .....	61
B. Action Plan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK.....	66
C. Action Plan Program Blended .....	73
D. Lembaga yang Terlibat pada Program Sinkronisasi Bidang Keahlian <sup>n</sup> di SMK.....	79
E. Sosialisasi Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK .....	80
BAB V .....	83
A. Aspek yang dievaluasi .....	83

B. Pihak yang Mengevaluasi.....	86
C. Strategi Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring.....	86
D. Pelaporan Hasil Evaluasi.....	88
PENUTUP.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) saat ini masih terikat kuat berdasarkan animo masyarakat, yaitu dengan memilih jurusan yang “sedang tren”. Hal itu membuat lulusan SMK cenderung memilih untuk mencari kerja di daerah perkotaan pada sektor formal. Akibatnya, perkembangan daerah menjadi lambat karena tenaga-tenaga terampil yang mestinya bisa diarahkan untuk membangun daerahnya justru memilih untuk bekerja di daerah lain di perkotaan (Corte, 2015; Wang, 2015; Putra, 2016; Mukhadis, 2016; dan Cherian & Jacob, 2013). Dampak urgen dari hal itu membuat perkembangan pendidikan di provinsi (kecamatan/kabupaten) kurang relevan dengan potensi/unggulan wilayahnya. Di Indonesia dari sekian ragam provinsi ada ragam potensi wilayah, baik dari sisi budaya, sumber daya alam, sosial, dan lain sebagainya. Di sisi lain, setiap wilayah daerah memiliki potensi-potensi besar yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan. Di samping itu, sesuai amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi berada pada tingkat kabupaten/kota, tetapi telah dialihkan ke tingkat provinsi. Pengelolaan SMK dan penerbitan izin pendirian SMK merupakan dua urusan yang saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Hal itu membuat pemerintah provinsi dapat sebagai “holder power” atas potensi daerahnya masing-masing. Potensi daerah merupakan kekuatan besar atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu baik dalam sumber daya alam, sosial budaya maupun sumber daya manusia yang dapat dikembangkan. Selain itu,

potensi daerah mampu menghasilkan suatu nilai tambah bagi daerah itu sendiri.

Keberhasilan pengelolaan potensi daerah harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul merupakan faktor kunci dalam meningkatkan ekonomi. Proses untuk mendapatkan SDM yang unggul dapat ditempuh melalui pendidikan (Keller-Schneider, 2014). Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk mengembangkan potensi unggulan daerahnya. Kompetensi tersebut lebih banyak masuk pada ranah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan bertumpu pada pembelajaran yang mengarah pada keterampilan pada tingkat menengah. Pada pelaksanaan "*stages of the electoral*" potensi unggulan daerah tidak bertujuan untuk menciptakan *difference-holistic* menurut ragam karakteristik daerah. Pemilihan potensi unggulan daerah tersebut merupakan langkah-maju dalam mengembangkan strategi akselerasi pembangunan daerah dengan potensi wilayahnya. Pada tahapan identifikasi maupun pengembangan potensi unggulan daerah melalui pendidikan kejuruan diperlukan kajian terhadap enam hal (Corte, 2012; Liu, 2016), yaitu: (1) keterkaitan tingkatan pembangunan dan SMK, (2) keterkaitan antar sektor, (3) kontribusi terhadap sektor atau struktur ekonomi, (4) penyerapan tenaga kerja dari SMK, (5) daya dukung SDM lulusan SMK dan teknologi, dan (6) pertimbangan strategis non ekonomi. Keenam kajian terkait identifikasi potensi unggulan daerah tersebut dapat dijelaskan seperti berikut:

#### *Keterkaitan Tingkatan Pembangunan dan SMK*

Menurut Mohammed (2015) dan Gil (2016) potensi unggulan daerah memiliki *direct linkages* dengan tingkatan pembangunan terutama

pembangunan pendidikan di suatu daerah. Struktur pendidikan khususnya pendidikan kejuruan, terbagi menjadi tiga sektor yaitu *primary sector*, *secondary and tertiary*. Sektor primer yang merupakan capaian kompetensi lulusan, sektor sekunder mencakup area tempat kerja, dan sektor tersier terdiri dari tingkat perkembangan pendidikan terhadap perekonomian. Jenis potensi unggulan daerah tersebut menjadi bagian penting dalam sektor-sektor ekonomi suatu daerah.

#### *Keterkaitan Antar Sektor*

Dikemukakan juga oleh Liu (2016) potensi unggulan daerah dapat kemungkinan memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya. Keterkaitan ini dapat ke belakang yaitu sektor penyedia *input (backward linkage)* atau ke depan yaitu sektor pengguna output (*forward linkage*). Berarti perkembangan potensi unggulan daerah dapat menjadi pendorong perkembangan sektor lainnya yang masih terkait.

#### *Kontribusi terhadap Sektor atau Struktur Ekonomi*

Potensi unggulan daerah dapat memberikan kontribusi yang besar dan dapat diandalkan bagi perekonomian daerah. Perkembangan potensi unggulan daerah dapat meningkatkan atau mengubah struktur ekonomi tertentu yang memiliki sektor unggulan. Hal itu berdampak langsung serta merata pada masing-masing daerah sesuai dengan potensi unggulannya.

#### *Penyerapan Tenaga Kerja dari SMK*

Peningkatan potensi unggulan daerah dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Berarti terjadi peningkatan kegiatan ekonomi sehingga pada gilirannya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Peningkatan tersebut akan mempengaruhi jumlah kebutuhan

lulusan SMK, sehingga keterserapan lulusan meningkat sesuai dengan perkembangan industri. Di sisi lain, peningkatan permintaan tenaga kerja akan menambah penyerapan tenaga kerja dalam perekonomian daerah.

#### *Daya Dukung SDM Lulusan SMK dan Teknologi*

Pengembangan potensi unggulan daerah memperhatikan daya dukung SDM dan teknologi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Potensi unggulan daerah yang menjadi andalan atau *tulang punggung* penting bagi perekonomian daerah membutuhkan SDM dan teknologi yang memadai untuk mengelolanya.

#### *Pertimbangan Strategis Non Ekonomi*

Pertimbangan strategis non ekonomi perlu juga diperhatikan terkait pengembangan potensi unggulan daerah. Hal ini disebabkan oleh peran penting sektor-sektor ekonomi untuk mendukung aspek sosial politik lainnya seperti stabilitas daerah, lestari budaya lokal, dan lain sebagainya. Para lulusan pendidikan kejuruan selayaknya dapat melaksanakan pekerjaan sesuai bakat dan minat serta keterampilan yang dimiliki secara profesional (Hidi, 2016; Wang, 2015; Mukhadis, 2015). Hal ini ditegaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 pada pasal 3 Ayat (2) bahwa “tujuan pendidikan menengah kejuruan yaitu mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional”. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Pendidikan kejuruan adalah pendidikan pada tingkat pendidikan menengah yang tujuannya mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk dapat melaksanakan jenis pekerjaan tertentu”. Bertumpu pada hal itu para siswa SMK harus dibekali dengan kompetensi kerja agar memiliki daya saing yang handal baik dalam bersaing dengan tenaga kerja

Indonesia maupun dengan tenaga kerja Asing. Kompetensi kerja yang dimaksud dalam hal ini yaitu kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Corte, 2015). Dikemukakan pula oleh Hanafin (2014) dan Wang (2015) adanya keahlian/keterampilan yang dimiliki oleh siswa SMK serta kesesuaian kompetensi yang diberikan oleh sekolah dan memiliki tingkat *main-required* industri diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang pada akhirnya dapat terserap dalam industri.

## **B. Dasar Hukum**

Peraturan kementerian dan daerah terkait dengan pengembangan peta potensi unggulan wilayah dalam sinkronisasi bidang keahlian di SMK yang relevan diantaranya yaitu:

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya;
- Peraturan Menteri Keuangan RI No mor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### **C. Tujuan**

Tujuan dari program sinkronisasi bidang keahlian di SMK ini yaitu untuk mengidentifikasi potensi unggulan wilayah setiap provinsi dalam pengembangan/sinkronisasi bidang keahlian di SMK, mengkaji dan mengelompokkan potensi unggulan wilayah setiap provinsi dalam pengembangan dan melakukan sinkronisasi bidang keahlian di SMK, serta memetakan ragam prioritas potensi unggulan wilayah setiap provinsi dalam pengembangan dan sinkronisasi bidang keahlian di SMK.

### **D. Ruang lingkup**

Pemetaan potensi unggulan di setiap wilayah provinsi di Indonesia. Pemetaan potensi prioritas unggulan wilayah di setiap provinsi di Indonesia. Pemetaan jumlah dan bidang keahlian SMK di setiap Provinsi di Indonesia. Pemetaan jumlah dan jenis tenaga kerja di setiap provinsi di Indonesia. Relevansi bidang keahlian di SMK dengan prioritas potensi unggulan wilayah di Indonesia.

### **E. Analisis Kesenjangan**

SMK menjadi harapan Pemerintah dapat mengatasi pengangguran, sebab SMK merupakan suatu wadah yang dipersiapkan untuk melatih siswa agar menjadi tenaga kerja terampil sesuai bidangnya (Chukwerdo, 2013; Hidi, 2016). Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan justru menunjukkan tidak adanya penurunan melainkan peningkatan yang sangat tajam dari tahun ketahun. Hal ini berdasarkan data yang dirilis oleh

BPS (*Badan Pusat Statistik*). Pada Februari 2016, tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 9,84%. Angka tersebut meningkat 0,79% dibandingkan Februari 2015. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor vital penyebab masalah tersebut yaitu kurang tercapainya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan potensi unggulan wilayahnya. Akibat hal itu, lulusan SMK tersebut tidak bisa menjadi “nyonya besar” di wilayahnya sendiri. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dipaparkan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi Pada Jenjang Pendidikan SMK**

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2012	2013	2014	2015	2016
		Februari	Februari	Februari	Februari	Februari
1	Tidak/belum pernah sekolah	126.972	112.435	134.040	124.303	94.293
2	Tidak/belum tamat SD	601.753	523.400	610.574	603.194	557.418
3	SD	1.418.683	1.421.873	1.374.822	1.320.392	1.218.954
4	SLTP	1.736.670	1.821.429	1.693.203	1.650.387	1.313.815
5	SLTA Umum/SMU	2.043.697	1.874.799	1.893.509	1.762.411	1.546.699
6	SLTA Kejuruan/SMK	1.018.465	864.649	847.365	1.174.366	1.348.327
7	Akademi/Diploma	258.385	197.270	195.258	254.312	249.362
8	Universitas	553.206	425.042	398.298	565.402	695.304
	<b>Total</b>	<b>7.757.831</b>	<b>7.240.897</b>	<b>7.147.069</b>	<b>7.454.767</b>	<b>7.024.172</b>

Sumber: BPS, 2016

Pada Tabel 1.1 dijelaskan jumlah pengangguran tingkat SLTA Kejuruan/SMK sebesar 1.348.327 (per Februari 2016) (BPS, 2016). Hal tersebut merupakan “kenyataan pahit” dan kemungkinan setiap tahunnya akan terus meningkat. Selain itu, *explosion problem* tersebut disebabkan oleh penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya keadaan sebaliknya dapat terjadi. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya (Dang 2016; Labe, 2016; Van, 2012; Hanafin, 2014). Lulusan SMK tidak hanya dicetak sebagai tenaga yang siap bekerja melainkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri atau berwirausaha dengan keterampilan yang dimiliki (Wang, 2015). Dengan seperti itu, para Lulusan SMK tidak perlu melakukan kegiatan *out area* untuk mencari pekerjaan sesuai jurusan yang mereka miliki melainkan dapat melakukan *job creation* dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Mengingat banyaknya jurusan-jurusan kejuruan SMK yang tersedia di daerah memiliki tingkat *conformity-optimal* yang rendah terhadap potensi-potensi daerah yang ada. Selain itu, dampak liniernya yaitu menyebabkan banyaknya para lulusan SMK yang menganggur bahkan melanjutkan kuliah yang tidak relevan dengan kejuruan yang mereka miliki Chukwerda (2013).

Jumlah provinsi di Indonesia yang mencapai 34 provinsi, masih cukup rendah tingkat kesesuaian pendidikan terhadap dunia industri. Tingkat ledakan aktif jumlah SMK yang semakin pesat, belum dapat meningkatkan keterserapan lulusan SMK tersebut. Sebagai contoh di Provinsi Sulawesi Selatan, kota Makassar terdapat SMK yang jurusannya tidak relevan dengan kondisi daerah tersebut. Membuka jurusan yang tidak sesuai potensi daerah sehingga menghasilkan lulusan yang tidak terserap dalam dunia kerja sehingga industri yang daerah tersebut diisi oleh tenaga

dari luar dikarenakan tidak adanya daya saing dan ketidak relevan keahlian yang dimiliki untuk diterima.

Potensi daerah yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan seperti rumput laut dan kakao bisa menjadi acuan dalam membuka jurusan yang sesuai dengan potensi daerah. Sehingga nantinya para lulusan dapat memberdayakan potensi daerah tersebut agar menghasilkan nilai tambah ekonomi dan membuka peluang kerja. Sama halnya pada provinsi Kalimantan Tengah, kota Palangkaraya yang memiliki potensi unggulan wilayah berupa padi ladang dan padi sawah. Pada daerah tersebut masih sangat terbatas SMK dengan jurusan pertanian dan perkebunan. Selain itu masih banyak provinsi di Indonesia yang harus mendapatkan perhatian dalam pemetaan potensi unggulan wilayah guna meningkatkan SMK sesuai dengan jurusan yang memiliki tingkat *needs-drastic*. Program Pemerintah mengenai pendidikan vokasi dan rencana penambahan jumlah SMK merupakan suatu upaya *right on target* dalam meningkatkan daya saing bangsa. Komposisi SMK sesuai dengan peta potensi unggulan wilayah akan mampu meningkatkan kasta-kualitas keterserapan tenaga kerja di Indonesia yang kemudian dapat mengembangkan perekonomian bangsa.



## BAB II

# LANDSCAPE, SASARAN DAN KERANGKA ACUAN PROGRAM SINKRONISASI BIDANG KEAHLIAN DI SMK

### A. Landscape Prioritas Potensi Unggulan Wilayah, Tenaga Kerja, dan Bidang Keahlian Di SMK

#### 1 Landscape Prioritas Potensi Unggulan Wilayah

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tenaga pengisi pembangunan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kualitas sumber daya manusianya sedini mungkin agar secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya produktif dan kreatif oleh seluruh komponen bangsa, agar generasi muda dapat maju secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lingkungan sekitar sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Jalur pendidikan kejuruan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan SDM yang dapat terserap oleh dunia kerja, sebab materi teori dan praktek telah diberikan sejak pertama masuk di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan harapan kompetensi yang dimiliki lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan SMK seharusnya mampu menguasai kompetensi yang berhubungan dengan lingkungannya. Hal itu berguna karena objek paling dekat lulusan SMK setelah lulus adalah lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar tersebut yaitu potensi unggulan wilayah.

Potensi daerah merupakan kemampuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan suatu daerah untuk menghasilkan nilai ekonomi dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Potensi yang ada pada suatu daerah dapat berupa potensi sumber daya alam, potensi sosial budaya, potensi sumber daya manusia yang apabila dimanfaatkan dan dikembangkan akan memberikan manfaat bagi manusia. Untuk menghasilkan suatu nilai ekonomi pada potensi dibidang tersebut harus dibarengi dengan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya lulusan SMK, yang terampil dan memiliki kemampuan dalam mengelolanya. Lulusan SMK wajib memiliki kompetensi sesuai dengan potensi unggulan wilayahnya agar mampu menjadi “nyonya besar” dan sebagai *creator* lapangan kerja dalam keberagaman potensi unggulan wilayahnya.

Keberagaman potensi unggulan wilayah di Indonesia sangat holistik dan luas. Potensi unggulan wilayah tersebut seperti bidang perikanan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang peternakan, bidang perkebunan, bidang perindustrian, bidang pertambangan, bidang pariwisata, industri kreatif, dan sebagainya. Maka dari itu penentuan prioritas potensi unggulan sangat penting agar fokus pengembangan lebih terarah. Penentuan prioritas tersebut dapat melalui pelaksanaan program sinkronisasi antar instansi pemerintahan. Sinkronisasi tersebut dapat dilakukan dengan membentuk konsorsium institusi pelaksana program sinkronisasi dengan melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi, Bappeda Provinsi, Disnaker Provinsi, LPMP, dan SMK. *Screenshot* peta prioritas potensi unggulan wilayah di Indonesia disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Screenshot Contoh Prioritas Potensi Unggulan Wilayah

No	Nama Provinsi	Potensi Unggulan Wilayah	Prioritas Potensi Unggulan
1	Provinsi Aceh	1. Pertanian (Sayur dan buah-buahan) 2. Industri (Semen, Pertambangan dll) 3. Jasa (Restoran, Akomodasi Perhotelan) 4. Perkebunan (Coklat, Kakao) 5. Peternakan (Sapi, Kerbau) 6. Perikanan tangkap 7. Industri Besar	1. Jasa 2. Pertanian 3. Industri
2	Provinsi Sumatera Utara	1. <b>Pertanian</b> 2. <b>Perikanan (Tangkap Ikan)</b> 3. <b>Peternakan</b> 4. <b>Kehutanan</b> 5. <b>Manufaktur</b> 6. <b>Perkebunan</b>	1. <b>Jasa</b> 2. <b>Pertanian</b> 3. <b>Manufaktur</b>
3	Provinsi Sumatera Barat	1. Pertanian (kelapa, kakao, gambir, cengkeh, kelapa sawit, nilam, teh) 2. Industri 3. Jasa 4. Perkebunan	1. <b>Pertanian</b> 2. <b>Jasa</b> 3. <b>Industri Kreatif</b>
4	Provinsi Riau	1. Pertanian (Sayur dan buah-buahan) 2. Industri (Semen, Pertambangan dll) 3. Jasa (Restoran, Akomodasi Perhotelan) 4. Perkebunan (Coklat, Kakao)	1. <b>Pertanian</b> 2. <b>Jasa</b> 3. <b>Industri Kreatif</b>
5	Provinsi Jambi	1. Perkebunan 2. Jasa Akomodasi 3. Perikanan 4. Industri	1. <b>Perdagangan</b> 2. <b>Perkebunan</b> 3. <b>Jasa</b>

No	Nama Provinsi	Potensi Unggulan Wilayah	Prioritas Potensi Unggulan
		5. Pertanian 6. Pertambangan	
6	Provinsi Sumatera Selatan	1. <b>Pertambangan Batu Bara</b> 2. <b>Perkebunan (Karet)</b> 3. Industri 4. Pertanian 5. Pertambangan 6. Perkebunan	1. Perkebunan 2. Perdagangan 3. Jasa
7	Provinsi Bengkulu	1. Pertanian (Sayur dan buah-buahan) 2. Manufaktur (Bisnis dan Manajemen) 3. Jasa (Restoran, Akomodasi Perhotelan) 4. Perkebunan (Coklat, Kakao) 5. Peternakan (Sapi, Kerbau)	1. Jasa 2. Pertanian 3. Manufaktur
8	Provinsi Lampung	1. Pertanian (Jagung, Ubi) 2. Industri (Oleh-Oleh, Akomodasi) 3. Jasa (Restoran, Akomodasi Perhotelan) 4. Peternakan (Sapi, Kerbau) 5. Perikanan tangkap	1. Pertanian 2. Jasa 3. Perdagangan
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1. Pertambangan (Nikel dan Timah) 2. Industri 3. Jasa (Restoran, Akomodasi Perhotelan) 4. Perkebunan 5. Pertanian	1. Jasa 2. Pertambangan 3. Pertanian

No	Nama Provinsi	Potensi Unggulan Wilayah	Prioritas Potensi Unggulan
10	Provinsi Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Jasa Transportasi, Pariwisata dll</b></li> <li>2. Pertambangan</li> <li>3. Pertanian</li> <li>4. Industri Pengolahan</li> <li>5. Pertanian</li> <li>6. Perkebunan</li> <li>7. Peternakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa</li> <li>2. Industri</li> <li>3. Pertanian</li> </ol>
11	Provinsi DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Pegolahan</li> <li>2. Jasa Kemasyarakatan</li> <li>3. Perdagangan</li> <li>4. Konstruksi</li> <li>5. Pertanian/Perkebunan</li> <li>6. Pertambangan</li> <li>7. Perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan</li> <li>2. Jasa Kemasyarakatan</li> <li>3. Industri</li> </ol>
12	Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian</li> <li>2. Industri Pengolahan</li> <li>3. Jasa (Restoran, Akomodasi Perhotelan)</li> <li>4. Perkebunan</li> <li>5. Peternakan</li> <li>6. Perikanan tangkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan</li> <li>2. Industri Pengolahan</li> <li>3. Jasa Kemasyarakatan</li> </ol>
13	Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian (Sayur dan buah-buahan)</li> <li>2. Industri (Semen, Pertambangan dll)</li> <li>3. Jasa (Restoran, Akomodasi Perhotelan)</li> <li>4. Perkebunan</li> <li>5. Peternakan</li> <li>6. Perikanan tangkap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian</li> <li>2. Industri</li> <li>3. Jasa kemasyarakatan</li> </ol>
14	Provinsi DI Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkebunan</li> <li>2. Pertanian (Sayur dan buah-buahan)</li> <li>3. Jasa (Restoran, Akomodasi Perhotelan)</li> <li>4. Industri</li> <li>5. Peternakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdagangan</li> <li>2. Pertanian</li> <li>3. Pertambangan</li> </ol>

No	Nama Provinsi	Potensi Unggulan Wilayah	Prioritas Potensi Unggulan
15	Provinsi Jawa Timur	1. Pertanian (Sayur dan buah-buahan) 2. Industri Pengolahan 3. Jasa (Restoran, Akomodasi Perhotelan) 4. Perkebunan (Coklat, Kakao) 5. Peternakan (Sapi, Kerbau)	1. Industri 2. Pertanian 3. Jasa Kemasyarakatan
16	Provinsi Banten	1. Perdagangan 2. Industri (Semen, Pertambangan dll) 3. Jasa (Restoran, Akomodasi Perhotelan) 4. Perkebunan 5. Peternakan 6. Pertanian	1. Perdagangan 2. Industri 3. Jasa
17	Provinsi Bali	1. Jasa Pariwisata 2. Industri Pengolahan 3. Pertanian 4. Perdagangan 5. Perkebunan 6. Jasa Boga 7. Seni Kriya 8. Energi dan Pertambangan	1. Perdagangan 2. Jasa 3. Kesenian
Dst.			

Interpretasi dari Tabel 2.1 dapat dipaparkan sebagai berikut.

- Interpretasi hasil analisis pada provinsi Aceh memiliki 6 potensi unggulan wilayah, diantaranya pertanian (tanaman pangan dan buah-buahan), jasa kemasyarakatan (usaha restoran, akomodasi perhotelan dan jasa bidang keteknikan), perkebunan (coklat & kakao), peternakan (sapi, kerbau, unggas), perikanan tangkap dan industri besar

(pertambangan dan industri semen). Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas potensi unggulan yaitu jasa kemasyarakatan, meliputi jasa boga, pariwisata dan akomodasi perhotelan yang banyak tersebar di provinsi aceh, pertanian tanaman pangan yang meliputi yaitu jagung, ubi-ubian, ketela dan tanaman pokok padi dan palawija, industri pengelolaan hasil tanaman pangan, dan beberapa industri.

- Interpretasi hasil analisis pada Sumatera Utara memiliki 4 potensi unggulan wilayah, diantaranya pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan, manufaktur dan perkebunan. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas potensi unggulan, jasa, meliputi pariwisata dan akomodasi perhotelan, agribisnis dan agroteknologi dalam bidang pengolahan hasil pertanian, industri manufaktur yang banyak tersebar di provinsi Sumatera Utara.
- Interpretasi hasil analisis pada Sumatera Barat memiliki 4 potensi unggulan wilayah, diantaranya pertanian (kelapa, kakao, gambir, cengkeh, kelapa sawit, nilam, lada dan kopi), industri, jasa akomodasi dan perkebunan. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Sumatera Barat yaitu pertanian, jasa (restoran dan pariwisata) dan industri kreatif.
- Interpretasi hasil analisis pada Riau memiliki 4 potensi unggulan wilayah, diantaranya pertanian (sayur dan buah-buahan), industri (semen dan pertambangan), jasa restoran, perkebunan. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Riau yaitu pertanian, jasa (restoran dan pariwisata) dan industri kreatif.
- Interpretasi hasil analisis pada Jambi memiliki 4 potensi unggulan wilayah, diantaranya .perkebunan, jasa, perikanan, industri, pertanian dan pertambangan. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3

prioritas potensi unggulan provinsi Jambi yaitu perdagangan, perkebunan, jasa.

- Interpretasi hasil analisis pada Sumatera Selatan memiliki 4 potensi unggulan wilayah, diantaranya pertambangan, perkebunan, industri, pertanian, pertambangan dan perkebunan. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Sumatera Selatan yaitu .pertanian, jasa, industri.
- Interpretasi hasil analisis pada Bengkulu memiliki 5 potensi unggulan wilayah, diantaranya pertanian, manufaktur, jasa, perkebunan dan peternakan. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Bengkulu yaitu jasa, pertanian, manufaktur
- Interpretasi hasil analisis pada Lampung memiliki 5 potensi unggulan wilayah, diantaranya pertanian, Industri oleh-oleh, jasa, peternakan dan perikanan. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Lampung yaitu pertanian, jasa, perdagangan.
- Interpretasi hasil analisis pada kepulauan Bangka Belitung memiliki 5 potensi unggulan wilayah, diantaranya pertambangan, industri, jasa, perkebunan dan pertanian. Setelah dilakukan sinkronisasi, didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Bangka Belitung yaitu jasa, pertambangan, pertanian.
- Interpretasi hasil analisis Dinas pada Kepulauan Riau memiliki 7 potensi, diantaranya .jasa, pertambangan, pertanian, industri, pertanian, perkebunan dan peternakan. Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Kepulauan Riau: jasa, industri, pertanian.
- Interpretasi hasil analisis pada DKI Jakarta memiliki 7 potensi, diantaranya .industri, jasa, perdagangan, konstruksi, pertanian, pertambangan dan perikanan. Setelah dilakukan sinkronisasi

didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi DKI Jakarta: perdagangan (perdagangan besar maupun kecil), jasa, industri.

- Interpretasi hasil analisis pada Jawa Barat memiliki 6 potensi, diantaranya .pertanian, industri pengolahan, jasa, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap. Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Jawa Barat: perdagangan (perdagangan besar maupun kecil), industri, jasa.
- Interpretasi hasil analisis pada Jawa Tengah memiliki 6 potensi, diantaranya .pertanian, industri pengolahan, jasa, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap. Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Jawa Tengah: .pertanian, industri, jasa kemasyarakatan.
- Interpretasi hasil analisis pada DI Yogyakarta memiliki 5 potensi, diantaranya .perkebunan, pertanian, jasa, industri dan peternakan. Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi DI Yogyakarta: perdagangan, pertanian, pertambangan.
- Interpretasi hasil analisis pada Jawa Timur memiliki 5 potensi, diantaranya .pertanian, industri pengolahan, jasa, perkebunan dan peternakan. Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Jawa Timur: industri, pertanian.
- Interpretasi hasil analisis pada Banten memiliki 6 potensi, diantaranya .perdagangan, industri, jasa, perkebunan, peternakan dan pertanian. Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Banten: perdagangan, industri, jasa.
- Interpretasi hasil analisis pada Bali memiliki 8 potensi, diantaranya jasa, industri, pertanian, perdagangan, perkebunan, jasa boga, seni kriya dan Energi dan Pertambangan. Setelah dilakukan sinkronisasi didapatkan 3 prioritas potensi unggulan provinsi Bali: perdagangan, jasa, kesenian.

## 2 Landscape Prioritas Tenaga Kerja

Perkembangan fenomena terbaru memandang tenaga kerja bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar HR (*Human Resources*), yaitu HC (*Human Capital*). Tenaga kerja merupakan besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Dalam data dari statistik Indonesia, tenaga kerja diartikan sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berada pada usia kerja, yaitu berumur 15-64 tahun yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga Kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk berusia 15-64 tahun yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuhan pribadi maupun masyarakat dalam suatu sistem ekonomi.

Ragam tenaga kerja di Indonesia yang begitu besar membuat fokus peningkatan kualitas tenaga kerja di Indonesia tidak dapat berjalan dengan pesat. Selain itu, penyebaran wilayah kerja lebih pada penyebaran tenaga kerja secara geografis, yang di dorong karena suatu alasan, terutama alasan akan kesempatan dan peluang kerja yang ada, khususnya di dalam wilayah geografis Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan warga Indonesia yang pesat, hal ini menimbulkan suatu permasalahan baru pada

jumlah tenaga kerja akan kebutuhan suatu pekerjaan demi melangsungkan kehidupannya. Hal ini pun mendorong masyarakat kita terutama para pencari kerja untuk mencari pekerjaan yang layak demi menjamin kehidupan “si tenaga kerja”, maupun menjamin orang lain yang menjadi tanggungannya. Keterbatasan lahan pekerjaan di suatu wilayah menyebabkan para pencari kerja mengalami kesulitan dalam mendapatkan mata penghasilan. Namun jika melihat potensi daerah lain, maka biasanya para pencari kerja akan “hijrah” guna mencari peruntungan di wilayah yang lain.

Di sisi lain, hal itu yang terjadi pada para pencari kerja di Pulau Jawa yang dinilai sudah padat akan penduduk untuk mencari kesempatan kerja di daerah-daerah yang dinilai masih sedikit jumlah penduduknya, namun memiliki potensi yang besar, seperti contoh pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan hal ini pulalah yang mendorong adanya kegiatan transmigrasi. Menyikapi hal itu maka sangat penting untuk menentukan prioritas tenaga kerja di Indonesia. *Screenshot* prioritas tenaga kerja di Indonesia disajikan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Screenshot Prioritas Tenaga Kerja di Indonesia**

No.	Provinsi	Tenaga Kerja
1	Kepulauan Riau	Prioritas: Pertanian Industri Jasa-jasa
2	DKI Jakarta	Prioritas: Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan Industri Pengolahan

No.	Provinsi	Tenaga Kerja
3	Jawa Barat	Prioritas: Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel Industri Pengolahan Jasa Kemasyarakatan
4	Jawa Tengah	Prioritas: Pertanian Perdagangan Industri
5	DI Yogyakarta	Prioritas: Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Jasa Kemasyarakatan
6	Jawa Timur	Prioritas: Industri Pertanian Jasa
7	Banten	Prioritas Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi Industri Jasa Kemasyarakatan
8	Bali	Prioritas: Perdagangan Pertanian Jasa
9	Nusa Tenggara Barat	Prioritas: Pertanian Perdagangan Jasa
10	Nusa Tenggara Timur	Prioritas: Pertanian Jasa Kemasyarakatan Perdagangan

No.	Provinsi	Tenaga Kerja
11	Kalimantan Barat	Prioritas: Pertanian Jasa-jasa Manufaktur
12	Kalimantan Tengah	Prioritas: Pertanian Perdagangan Jasa Kemasyarakatan
13	Kalimantan Selatan	Prioritas: Jasa Pertanian Industri
14	Kalimantan Timur	Prioritas: Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi Jasa kemasyarakatan Pertanian, Perkebunan dan Perikanan
Dst.		

### 3 Landscape Prioritas Bidang Keahlian di SMK

Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari pendidikan yang mempunyai tugas utama untuk mempersiapkan siswa dalam bekerja. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan untuk bekerja dimana seseorang mendapatkan pekerjaan yang menyenangkan atau cocok seperti harapan masyarakat pada umumnya. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan jenis dan bidang-bidang pekerjaan yang tersedia di lapangan kerja, baik bekerja mandiri atau berwirausaha maupun bekerja pada industri. Hal inilah yang menjadi menjadikan ragam bidang keahlian SMK harus berorientasi terhadap jenis-jenis bidang pekerjaan atau keahlian yang

berkembang dan dibutuhkan oleh DU/DI. Penyesuaian pada jenis-jenis bidang keahlian tersebut dikenal dengan sebutan *Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan*. Spektrum sebagaimana dimaksud merupakan acuan dalam pembukuan dan penyelenggaraan bidang/program/paket keahlian pada SMK menurut keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 8275/D5.3/KR/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Jenis-jenis program pendidikan pada SMK/MAK disebut spektrum keahlian, karena jurusan-jurusan yang dikembangkan di SMK/MAK bentuknya adalah keahlian-keahlian atau jabatan-jabatan pekerjaan (*job titles*) yang ada dan berkembang di dunia kerja, jadi bukan didasarkan atas disiplin keilmuan. Suatu keahlian atau jabatan pekerjaan (*job title*) dapat merupakan hasil *pemfusan* dari sejumlah disiplin keilmuan. Hal ini dapat diacukan pada pengertian kompetensi sebagaimana disampaikan oleh Earnest dan de Melo (2001), yakni *as a statement which describes the integrated demonstration of a cluster of related skills and attitudes that are observable and measurable necessary to perform a job independently at a prescribed proficiency level*. Pernyataan tersebut menyatakan dengan jelas bahwa suatu kompetensi dapat didefinisikan sebagai demonstrasi terintegrasi sekelompok keterampilan, yakni keterampilan kognitif dan keterampilan teknis, dan sikap yang teramati dan terukur untuk melakukan pekerjaan tertentu pada level tertentu.

Spektrum Keahlian yang saat ini berlaku adalah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Dikbud Nomor 8275/D5.3/KR/2016, Spektrum Keahlian PMK terdiri atas 9 (sembilan) Bidang Keahlian, 48 Program Keahlian, dan 142 Paket Keahlian sebagaimana dapat ditelaah pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

**Tabel 2.3. Rekapitulasi Daftar Program Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan**

<b>Bidang Keahlian</b>	<b>Program Keahlian</b>	<b>Paket Keahlian</b>
1. Teknologi dan Rekayasa	13	58
2. Teknik Informasi dan Komunikasi	2	6
3. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	5	7
4. Agribisnis dan Agroteknologi	6	20
5. Kemaritiman	4	10
6. Bisnis dan Manajemen	3	5
7. Pariwisata	4	8
8. Energi dan Pertambangan	3	6
9. Seni dan Industri Kreatif	8	22
<b>JUMLAH</b>	<b>48</b>	<b>142</b>

Spektrum Keahlian tersebut merupakan acuan bagi sekolah (SMK/MAK) untuk membuka dan mengembangkan program pendidikan. Sekolah hanya boleh membuka atau menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan spektrum keahlian yang berlaku. Pada masing-masing bidang keahlian tersebut memuat program keahlian dan kompetensi keahlian. Ragam bidang keahlian tersebut seharusnya ditata

dan dikontrol sesuai dengan prioritas potensi unggulan wilayahnya. Selanjutnya, contoh *screenshot* prioritas ragam bidang keahlian SMK disajikan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Screenshot Contoh Kesesuaian Prioritas Ragam Bidang Keahlian SMK**

No.	Nama Provinsi	Prioritas Unggulan	Ragam Bidang Keahlian di SMK dengan Prioritas Unggulan Wilayah	
			Sesuai	Kurang Sesuai
1	Provinsi Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertambagan</b></li> <li>• <b>Jasa</b></li> <li>• <b>Perikanan</b></li> </ul>	1. Energi dan Pertambagan <b>(53 Bidang Keahlian)</b> 2. Pariwisata <b>(16 Bidang Keahlian)</b> 3. Kemaritiman <b>(13 Bidang Keahlian)</b>	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 3. Agribisnis dan Agroteknologi 4. Bisnis dan Manajemen 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Teknologi dan Rekayasa
2	Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertanian</b></li> <li>• <b>Industri</b></li> <li>• <b>Perdagangan</b></li> </ul>	1. Agribisnis dan Agroteknologi <b>(78 Bidang Keahlian)</b> 2. Teknologi dan Rekayasa <b>(45 Bidang Keahlian)</b> 3. Bisnis dan Managemn	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 3. Kemaritiman 4. Pariwisata 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Energi dan Pertambangan

No.	Nama Provinsi	Prioritas Unggulan	Ragan Bidang Keahlian di SMK dengan Prioritas Unggulan Wilayah	
			Sesuai	Kurang Sesuai
			(41 Bidang Keahlian)	
3	Provinsi Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertanian</b></li> <li>• <b>Jasa</b></li> <li>• <b>Industri</b></li> </ul>	1. Agribisnis dan Agroteknologi <b>(26 Bidang Keahlian)</b> 2. Pariwisata <b>(18 Bidang Keahlian)</b> 3. Teknologi dan Rekayasa <b>(13 Bidang Keahlian)</b>	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 3. Kemaritiman 4. Bisnis dan Manajemen 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Energi dan Pertambangan
4	Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertanian</b></li> <li>• <b>Perdagangan</b></li> <li>• <b>Industri</b></li> </ul>	1. Agribisnis dan Agroteknologi <b>(44 Bidang Keahlian)</b> 2. Bisnis dan Manajemen <b>(107 Bidang Keahlian)</b> 3. Teknologi dan Rekayasa <b>(3 Bidang Keahlian)</b>	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 3. Kemaritiman 4. Pariwisata 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Energi dan Pertambangan

No.	Nama Provinsi	Prioritas Unggulan	Ragan Bidang Keahlian di SMK dengan Prioritas Unggulan Wilayah	
			Sesuai	Kurang Sesuai
5	Provinsi Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertambangan</b></li> <li>• <b>Perikanan</b></li> <li>• <b>Kehutanan</b></li> </ul>	1. Energi dan Pertambangan (7 Bidang Keahlian) 2. Agribisnis dan Agroteknologi (12 Bidang Keahlian) 3. Kemaritiman (4 Bidang Keahlian)	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 3. Bisnis dan Manajemen 4. Pariwisata 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Teknologi dan Rekayasa
6	Provinsi Sulawesi Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perikanan</b></li> <li>• <b>Pertanian</b></li> <li>• <b>Pertambangan</b></li> </ul>	1. Kemaritiman (19 Bidang Keahlian) 2. Agribisnis dan Agroteknologi (24 Bidang Keahlian) 3. Energi dan Pertambangan (72 Bidang Keahlian)	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 3. Bisnis dan Manajemen 4. Pariwisata 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Teknologi dan Rekayasa

No.	Nama Provinsi	Prioritas Unggulan	Ragan Bidang Keahlian di SMK dengan Prioritas Unggulan Wilayah	
			Sesuai	Kurang Sesuai
7	Provinsi Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertanian</b></li> <li>• <b>Jasa</b></li> <li>• <b>Perdagangan</b></li> </ul>	1. Agribisnis dan Agroteknologi <b>(73 Bidang Keahlian)</b> 2. Pariwisata <b>(20 Bidang Keahlian)</b> 3. Bisnis dan Manajemen <b>(73 Bidang Keahlian)</b>	1. Teknologi dan Rekayasa 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 4. Kemaritiman 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Energi dan Pertambangan
8	Provinsi Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perkebunan</b></li> <li>• <b>Perikanan</b></li> <li>• <b>Perdagangan</b></li> </ul>	1. Agribisnis dan Agroteknologi <b>(69 Bidang Keahlian)</b> 2. Kemaritiman <b>(38 Bidang Keahlian)</b> 3. Bisnis dan Manajemen <b>(142 Bidang Keahlian)</b>	1. Teknologi dan Rekayasa 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 4. Pariwisata 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Energi dan Pertambangan

No.	Nama Provinsi	Prioritas Unggulan	Ragan Bidang Keahlian di SMK dengan Prioritas Unggulan Wilayah	
			Sesuai	Kurang Sesuai
9	Provinsi Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertanian</b></li> <li>• <b>Jasa</b></li> <li>• <b>Pertambangan</b></li> </ul>	1. Agribisnis dan Agroteknologi <b>(49 Bidang Keahlian)</b> 2. Pariwisata <b>(2 Bidang Keahlian)</b> 3. Energi dan Pertambangan <b>(55 Bidang Keahlian)</b>	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 3. Kemaritiman 4. Bisnis dan Manajemen 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Teknologi dan Rekayasa
10	Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertanian</b></li> <li>• <b>Jasa</b></li> <li>• <b>Perdagangan</b></li> </ul>	1. Agribisnis dan Agroteknologi <b>(30 Bidang Keahlian)</b> 2. Pariwisata <b>(10 Bidang Keahlian)</b> 3. Bisnis dan Manajemen <b>(21 Bidang Keahlian)</b>	1. Teknologi dan Rekayasa 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 4. Kemaritiman 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Energi dan Pertambangan
11	Provinsi Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertanian</b></li> <li>• <b>Perdagangan</b></li> <li>• <b>Jasa</b></li> </ul>	1. Agribisnis dan Agroteknologi <b>(52 Bidang Keahlian)</b> 2. Bisnis dan Manajemen <b>(44 Bidang Keahlian)</b>	1. Teknologi dan Rekayasa 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi 3. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 4. Kemaritiman 5. Seni dan Industri Kreatif

No.	Nama Provinsi	Prioritas Unggulan	Ragan Bidang Keahlian di SMK dengan Prioritas Unggulan Wilayah	
			Sesuai	Kurang Sesuai
			3. Pariwisata (17 Bidang Keahlian)	6. Energi dan Pertambangan
1 2	Provinsi Maluku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertanian</b></li> <li>• <b>Jasa</b></li> <li>• <b>Pertambangan</b></li> </ul>	1. Agribisnis dan Agroteknologi <b>(52 Bidang Keahlian)</b> 2. (52 Bidang Keahlian) 3. Pariwisata <b>(9 Bidang Keahlian)</b> 5. Energi dan Pertambangan <b>(18 Bidang Keahlian)</b>	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 3. Kemaritiman 4. Bisnis dan Manajemen 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Teknologi dan Rekayasa
1 3	Provinsi Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertambangan</b></li> <li>• <b>Pertanian</b></li> <li>• <b>Jasa</b></li> </ul>	1. Energi dan Pertambangan <b>(27 Bidang Keahlian)</b> 2. Pariwisata <b>(6 Bidang Keahlian)</b> 3. Agribisnis dan Agroteknologi <b>(39 Bidang Keahlian)</b>	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 3. Kemaritiman 4. Bisnis dan Manajemen 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Energi dan Pertambangan

No.	Nama Provinsi	Prioritas Unggulan	Ragam Bidang Keahlian di SMK dengan Prioritas Unggulan Wilayah	
			Sesuai	Kurang Sesuai
14	Provinsi Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pertambangan</b></li> <li>• <b>Industri</b></li> <li>• <b>Perkebunan</b></li> </ul>	1. Energi dan Pertambangan <b>(18 Bidang Keahlian)</b> 2. Bisnis dan Manajemen <b>(21 Bidang Keahlian)</b> 3. Agribisnis dan Agroteknologi <b>(13 Bidang Keahlian)</b>	1. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 3. Kemaritiman 4. Pariwisata 5. Seni dan Industri Kreatif 6. Teknologi dan Rekayasa
Dst.				

Pada provinsi Kalimantan Barat, prioritas unggulannya yaitu pertambangan, jasa dan perikanan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 82 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah yaitu Energi dan Pertambangan (53 Bidang Keahlian), Pariwisata (16 Bidang Keahlian), Kemaritiman (13 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 286 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Agribisnis dan Agroteknologi, Bisnis dan Manajemen, Seni dan Industri kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

Pada provinsi Kalimantan Tengah, prioritas unggulannya yaitu Pertanian, Industri, dan perdagangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 164 bidang keahlian. Ragam

bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah yaitu Agribisnis dan Agroteknologi (78 Bidang Keahlian), Teknologi dan Rekayasa (45 Bidang Keahlian), Bisnis dan Manajemen (41 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 101 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Kalimantan Selatan, prioritas unggulannya yaitu Pertanian, jasa dan industri. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 164 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah yaitu Agribisnis dan Agroteknologi (26 Bidang Keahlian), Pariwisata (18 Bidang Keahlian), Teknologi dan Rekayasa (13 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 114 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Kalimantan Timur, prioritas unggulannya yaitu Pertanian, perdagangan dan industri. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 154 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah yaitu Agribisnis dan Agroteknologi (44 Bidang Keahlian), Bisnis dan Manajemen (107 Bidang Keahlian) dan Teknologi dan Rekayasa (3 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 288 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Kalimantan Utara, prioritas unggulannya yaitu Pertambangan, perikanan dan kehutanan. Total bidang keahlian yang

sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 23 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Energi dan Pertambangan (7 Bidang Keahlian), Agribisnis dan Agroteknologi (12 Bidang Keahlian), Kemaritiman (4 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 30 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

Pada provinsi Sulawesi Utara, prioritas unggulannya yaitu Perikanan, Pertanian dan Pertambangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 115 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Kemaritiman (19 Bidang Keahlian), Agribisnis dan Agroteknologi (24 Bidang Keahlian), Energi dan Pertambangan (72 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 366 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

Pada provinsi Sulawesi Tengah, prioritas unggulannya yaitu Pertanian, Jasa dan Perdagangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 166 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Agribisnis dan Agroteknologi (73 Bidang Keahlian), Pariwisata (20 Bidang Keahlian) dan Bisnis dan Manajemen (73 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 226 bidang keahlian, diantaranya Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Sulawesi Selatan, prioritas unggulannya yaitu Perkebunan, Perikanan dan Perdagangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 249 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Agribisnis dan Agroteknologi (69 Bidang Keahlian), Kemaritiman (38 Bidang Keahlian), Bisnis dan manajemen (142 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 226 bidang keahlian, diantaranya Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Sulawesi Tenggara, prioritas unggulannya yaitu Pertanian, Jasa dan Pertambangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 117 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Agribisnis dan Agroteknologi (49 Bidang Keahlian), Pariwisata (2 Bidang Keahlian), Energi dan Pertambangan (55 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 129 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Seni dan Industri Kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

Pada provinsi Gorontalo, prioritas unggulannya yaitu Pertanian, Jasa dan Perdagangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 61 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Agribisnis dan Agroteknologi (30 Bidang Keahlian), Pariwisata (10 Bidang Keahlian), Bisnis dan Manajemen (21 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 68 bidang keahlian, diantaranya Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan

Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Sulawesi Barat, prioritas unggulannya yaitu Pertanian, Jasa dan Perdagangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 113 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Agribisnis dan Agroteknologi (52 Bidang Keahlian), Pariwisata (17 Bidang Keahlian), Bisnis dan Manajemen (44 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 155 bidang keahlian, diantaranya Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Seni dan Industri Kreatif, Energi dan Pertambangan.

Pada provinsi Maluku, prioritas unggulannya yaitu Pertanian, Jasa dan Pertambangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 79 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Agribisnis dan Agroteknologi (52 Bidang Keahlian), Pariwisata (9 Bidang Keahlian), Energi dan Pertambangan (18 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 126 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Seni dan Industri Kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

***Pada provinsi Maluku Utara, prioritas unggulannya yaitu Pertanian, Jasa dan Pertambangan. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 72 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Agribisnis dan Agroteknologi (27 Bidang Keahlian), Pariwisata (6 Bidang Keahlian), Energi***

**dan Pertambangan (39 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 126 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Bisnis dan Manajemen, Seni dan Industri Kreatif, Teknologi dan Rekayasa.**

Pada provinsi Papua Barat, prioritas unggulannya yaitu Pertambangan, Pertanian dan Jasa. Total bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 52 bidang keahlian. Ragam bidang keahlian di SMK yang sesuai dengan prioritas unggulan wilayah Energi dan Pertambangan (18 Bidang Keahlian), Bisnis dan Manajemen (21 Bidang Keahlian), Agribisnis dan Agroteknologi (13 Bidang Keahlian). Ragam bidang keahlian yang tidak sesuai dengan prioritas unggulan wilayah sebanyak 43 bidang keahlian, diantaranya Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Kemaritiman, Pariwisata, Seni dan Industri Kreatif, Teknologi dan Rekayasa.

## **Pengertian dan Sasaran Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK**

### **1 Pengertian Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK**

Program Sinkronisasi SMK merupakan program yang dirancang untuk menghubungkan dan mementingkan peta potensi wilayah dengan bidang keahlian di SMK. Pemerintah sebenarnya mulai menata kelembagaan SMK meliputi program kejuruan yang di buka dan pemilihan lokasi SMK yang disesuaikan dengan peta kebutuhan tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja. Permasalahan umum yang terjadi adalah masih maraknya SMK yang membuka bidang keahlian diluar potensi unggulan, karena masih mengedapankan *trend* dan asumsi masyarakat terhadap bidang keahlian "*IT Based*". Program sinkronisasi bidang keahlian SMK bertujuan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, kebijakan dalam Instruksi Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah

Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia di Indonesia. Inpres tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 September 2016 di Jakarta ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja yang menginstruksikan agar (1) mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; (2) menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK; dan (3) mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, pendidik, dan tenaga pendidik SMK serta mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama dan menginstruksikan secara khusus kepada gubernur untuk melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK, mengembangkan SMK unggulan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pendidikan SMK sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing.

Program sinkronisasi inilah yang menjadi muara terciptanya tujuan luhur yang tertuang pada Inpres No 9 Tahun 2016, dengan memfokuskan pada point 4 pada Gambar 2.1 SMK diharapkan mampu menjadi mercusuar dan percontohan bahwa pembelajaran di SMK pasti sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersebar dalam lingkup kemasyarakatan. Program sinkronisasi bidang keahlian bukan saja memfokuskan pada bidang keahlian namun juga mencakup lapangan pekerjaan yang ada di wilayah tersebut, kemudian di analisis secara komparatif bersama data Bappeda dan Dinas Pendidikan untuk menemukan kesimpulan bahwa suatu daerah perlu membangun bidang keahlian yang sesuai dengan potensi unggulan wilayah.



**Gambar 2.1 Skema Inpres No.9/2016**

## **2 Sasaran Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK**

Sasaran program sinkronisasi adalah sekolah yang memiliki bidang keahlian yang tidak sesuai dengan potensi peta unggulan wilayah, ketidaksesuaian tersebut dilihat dari potensi unggulan wilayah yang disinkronisasikan dengan sebaran bidang keahlian di setiap provinsi di Indonesia. Benang merah yang dijadikan *headline topic* adalah SMK yang dibangun harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi potensi daerah baik dari segi tempat dan waktu pelaksanaannya yang mengikuti perkembangan teknologi dan kemajuan industri maupun latar belakang para siswa SMK yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda baik segi material maupun non material. Penyesuaian tersebut bukan hanya berfokus pada pembangunan SMK, namun SMK yang dibangun, jurusannya harus menyesuaikan dengan potensi daerah, materi atau mata pelajaran yang diajarkan pada jurusan harus sesuai dengan potensi daerah

dan kemajuan teknologi serta kebutuhan industri, program yang dibuat harus berdasarkan pada pengembangan potensi daerah, kebutuhan masyarakat sekitar, serta kemampuan siswa SMK itu sendiri, serta dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah dan Industri dalam menyiapkan para siswa untuk dapat magang sesuai jurusannya.

Secara esensial, sasaran pada program sinkronisasi bidang keahlian di SMK yaitu terlaksananya pengkajian peta unggulan wilayah provinsi di Indonesia, secara khusus sasaran penelitian ini yaitu:

1. Terpetakan potensi unggulan wilayah di Indonesia sebagai acuan pengembangan/sinkronisasi bidang keahlian di SMK
2. Peningkatan relevansi bidang keahlian dan kualitas pendidikan SMK berdasarkan prioritas potensi unggulan wilayah di Indonesia.
3. Hasil kajian tentang potensi unggulan wilayah sebagai landasan akademis sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan program bidang keahlian di Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Sasaran program sinkronisasi berdasarkan data awal jumlah dan ragam bidang keahlian di wilayah provinsi seluruh Indonesia yang dapat dilihat persentase maupun relevansi bidang keahlian, potensi wilayah, lapangan pekerjaan, dan jumlah SMK dalam 1 Provinsi, lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.5. Program sinkronisasi tidak hanya menargetkan lingkup provinsi, namun menargetkan dari pusat sampai tingkat kota maupun kabupaten.

Sasarannya sangat jelas yakni SMK yang memiliki Bidang keahlian yang tidak relevan dengan potensi unggulan wilayah. Instrumen penilaian sasaran program sinkronisasi disajikan pada tabel 2.5.

Tabel 2.5 Instrumentasi Penilaian Sasaran Sinkronisasi

No	Nama SMK	Bidang Keahlian	Potensi Wilayah	Lapangan Pekerjaan	Jumlah SMK
1	SMK Nawa Cinta				
2	Dst.				
		% Relevansi (1)	% Relevansi (2)	% Relevansi (3)	% Relevansi (4)

## B. Kerangka Acuan Pelaksanaan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

### 1 Acuan Penyelenggaraan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

Kebutuhan meningkatkan daya saing lulusan SMK menjadi kebutuhan nasional untuk meningkatkan produktifitas nasional. Fakta yang ada menunjukkan bahwa daya saing tenaga kerja nasional Indonesia yang masih rendah dibanding dengan negara-negara ASEAN maupun di negara-negara anggota OECD. Kualitas lulusan SMK masih di bawah standar daya saing tenaga kerja internasional. Oleh karena itu diperlukan tindakan-tindakan strategis dan kreatif agar peningkatan kualitas lulusan SMK dicapai secepatnya dan efisien. Program pengembangan daya saing lulusan SMK harus didasarkan atas pemetaan potensi dan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap potensi unggulan wilayah.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas dengan keanekaragaman geografis, budaya, dan sumber daya manusia maupun kekayaan alam sangat besar. Oleh karena itu diperlukan pemetaan landscape potensi masing-masing wilayah sebagai basis keunggulan. Pada sisi lain potensi geografis, budaya dan sumber daya

unggul tersebut belum didukung penuh oleh ketersediaan industri yang akan menyerap lulusan SMK. Sebagian besar industri yang ada masih terkonsentrasi wilayah Indonesia bagian barat khususnya di Pulau Jawa. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dan sinkronisasi program agar setiap potensi yang dimiliki wilayah dapat dikembangkan secara optimal.

Eksisting peta kompetensi yang dikembangkan di SMK menunjukkan masih terbatas pada bidang-bidang (*spectrum*) yang ditetapkan kementerian pendidikan nasional dalam hal ini Direktorat Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK). Persoalannya adalah konsentrasi keahlian dan sebaran kompetensi yang dikembangkan belum mengacu pada potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu program sinkronisasi pengembangan SMK berdasar pada potensi unggulan wilayah. Potensi yang dimaksud mencakup unggulan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), potensi SMK terutama pada program keahlian bidang (*spectrum*), dan potensi industri yang ada di satu wilayah. Sinkronisasi juga perlu melibatkan orang tua siswa sebagai salah satu *stakeholders* SMK. Pengembangan program revitalisasi landscape potensi unggulan wilayah dilaksanakan dengan melakukan identifikasi, kajian, klasifikasi, dan pemetaan pada masing-masing provinsi.

*Identifikasi.* Pada langkah awal, pengembangan program dimulai dari tahap identifikasi. Identifikasi dilakukan melalui studi dokumentasi hingga observasi fakta lapangan. Selain itu, tahap identifikasi juga melalui angket kepada seluruh provinsi yang ada di Indonesia (34 provinsi). Data identifikasi dengan tingkat relevan dan kevalidan tinggi, diambil dari instansi pemerintahan seperti Dinas Pendidikan Provinsi, Bappeda provinsi, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. *Pengkajian dan Klasifikasi.* Tahapan selanjutnya yaitu pengkajian dan klasifikasi hasil identifikasi.

Pada pengembangan tahap ini hasil identifikasi diklasifikasi berdasarkan rumpun potensi unggulan sejenis. Kalsifikasi tersebut kemudian dianalisis dan didapatkan hasil prioritas potensi unggulan wilayah di provinsi di Indonesia. *Pemetaan*. Pada tahap ini, pemetaan sudah berdasarkan potensi prioritas potensi unggulan. Prioritas potensi merupakan bagian dari beberapa identifikasi potensi unggulan wilayah. Prioritas berdasarkan kajian sinkronisasi dengan hasil data kajian dari masing-masing instansi pemerintahan.

Proses sinkronisasi bidang keahlian di SMK merupakan suatu bagian terpenting dalam pengembangan bidang keahlian di SMK. Pada proses inilah hasil dari sinkronisasi di tentukan. Ketika proses ini berjalan baik, maka baik juga hasil dari sinkronisasi tersebut. Langkah untuk memaksimalkan proses sinkronisasi agar dapat mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukanlah perencanaan pembelaran terlebih dahulu. Di sisi lain, sebelum membuat perencanaan sinkronisasi, terlebih dahulu perlu melakukan analisis kebutuhan terhadap pengguna (Dinas Pendidikan Provinsi). Hal ini perlu dilakukan agar nantinya hasil data yang diterima oleh Dinas Pendidikan Provinsi benar-benar suatu yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Dijelaskan dalam ensiklopedia evaluasi yang disusun oleh Anderson dan kawan-kawan, analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu proses kebutuhan sekaligus menentukan prioritas. Need Assessment (analisis kebutuhan) merupakan suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan/seharusnya (*should be/ought to be*) atau diharapkan dengan kondisi yang ada (*what is*). Kondisi yang diinginkan seringkali disebut dengan kondisi ideal, sedangkan kondisi yang ada, seringkali disebut dengan kondisi riil atau kondisi nyata. Analisis kebutuhan sebagai suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara keluaran dan dampak yang nyata dengan keluaran dan

dampak yang diinginkan, kemudian menempatkan deretan kesenjangan ini dalam skala prioritas lalu memilih hal yang paling penting untuk diselesaikan masalahnya. *Need Assessment* dapat diterapkan pada individu, kelompok atau lembaga (institusi). Ada beberapa hal yang melekat pada pengertian dari *need assessment*. Pertama, *need assessment* merupakan suatu proses artinya ada rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan *need assessment*. *Need assessment* bukanlah suatu hasil, akan tetapi suatu aktivitas tertentu dalam upaya mengambil keputusan tertentu. Kedua, kebutuhan itu sendiri pada hakikatnya merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. *Need assessment* (analisis kebutuhan) pada kajian ini merupakan proses menganalisis data dalam mengidentifikasi gap (kesenjangan) antara kondisi SMK saat ini dengan kondisi SMK yang diharapkan sehingga dapat diperoleh data mengenai kebutuhan SMK yang sesuai dengan prioritas potensi unggulan wilayah. Informasi yang diperoleh selanjutnya dijadikan pondasi untuk melakukan sinkronisasi Bidang Keahlian Dengan Prioritas Potensi Unggulan Wilayah Dan Prioritas Tenaga Kerja.

#### *Keterfungsian Analisis Kebutuhan*

Metode *Need Assessment* dibuat untuk bisa mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi dalam pembelajaran siswa dari apa yang diharapkan dan apa yang sudah didapat. Dalam pengukuran kesenjangan seorang analisis harus mampu mengetahui seberapa besar masalah yang dihadapi.

Beberapa fungsi *Need Assessment* sebagai berikut:

- Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan bidang keahlian di SMK yang relevan dengan prioritas potensi unggulan wilayah, yaitu masalah apa yang mempengaruhi pengembangan bidang keahlian di SMK

- Mengidentifikasi prioritas potensi unggulan setiap wilayah provinsi di Indonesia, yaitu potensi unggulan sesuai dengan komoditi utama wilayah.
- Mengidentifikasi prioritas tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap provinsi di Indonesia.

#### *Langkah-langkah Analisis Kebutuhan*

Glasgow menggambarkan *need assessment* dalam bentuk kegiatan yang dimulai dari tahapan pengumpulan informasi sampai merumuskan masalah. Sedangkan Morrison menggambarkan *Need assessment* dalam bentuk kegiatan yang dimulai dari perencanaan sampai membuat laporan akhir. Analisis kebutuhan merupakan alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan kelompok dan individu. Perubahan ini menunjukkan upaya formal yang sistematis menentukan dan mendekatkan jarak kesenjangan antara “seperti apa yang ada” dengan “bagaimana seharusnya”. Tiga langkah penting yang dilakukan oleh guru inovatif dalam menyiapkan rencana pembelajaran dengan memasukkan unsur analisis kebutuhan yang disisipkan di antara pemilihan materi dengan pemilihan strategi pembelajaran.

#### *Tahap-Tahap Need Assessment*

Analisis kebutuhan dilakukan secara bertahap, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data dan interpretasi, deseminasi dan pembuatan laporan.

##### 1. Persiapan

- Mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang audien dan target populasi.

- Mengklarifikasi tujuan analisis kebutuhan yaitu meliputi alasan yang dinyatakan (*stated reason*) yaitu antara lain seleksi perseorangan atau group untuk berpartisipasi dalam program, alokasi dana, dll. dan alasan yang tidak dinyatakan (*unstated reason*).
- Menetapkan cakupan dan tempat analisis kebutuhan.
- Menentukan orang yang akan terlibat di dalam pelaksanaan analisis kebutuhan yang meliputi keterlibatan anggota, menjalin komunikasi dengan group tersebut sepanjang studi
- Mengembangkan dan memperhatikan isu-isu politik yang urgen yaitu meliputi pelibatan individu dan grup kunci dalam lingkungannya, komunikasi secara terus-menerus, mengidentifikasi dan pendekatan terhadap orang-orang yang berada dalam lingkungan birokrasi.
- Mengidentifikasi dan menjelaskan informasi yang dibutuhkan yang meliputi keadaan, program, biaya, kerangka konsep dan dasar filosofi serta indicator keberhasilan.

## 2. Pengumpulan Data

- Mengumpulkan sumber informasi yang relevan.
- Menentukan sampel.
- Menentukan prosedur pengumpulan data dan instrument
- Menetapkan rencana implementasi dan prosedur observasi.
- Mendokumentasi dan menyimpan informasi.

## 3. Analisis Data dan Interpretasi

- Mereview dan memperbaharui informasi yang telah dikumpulkan.
- Mereview informasi dengan grup yang relevan.
- Melakukan analisis deskriptik sesuai dengan tipe informasi.
- Menilai informasi yang tersedia.
- Melakukan analisis.

### *Diseminasi Hasil Analisis dan Pembuatan Laporan*

Data yang telah dianalisis dipresentasikan dan dirumuskan dalam bentuk kebijakan, sebagai rekomendasi. Hasil yang dipresentasikan dalam forum seminar disebut dengan diseminasi hasil evaluasi, dengan peserta, para perencana dan pelaksana program, pimpinan lembaga, pihak sponsor, masyarakat yang terkena program dan stake holder.

Adapun standar yang digunakan untuk mereview dan mengevaluasi rencana laporan berdasarkan Standar Evaluasi Analisis Kebutuhan antara lain:

- Standar Kegunaan, yaitu meliputi antara lain: identifikasi audiens, kredibilitas penilai, cakupan informasi, interpretasi penilaian, kejelasan laporan, diseminasi laporan, jadwal laporan dan dampak dari evaluasi.
- Standar Feasibility (Kelayakan) yaitu meliputi prosedur praktis, pengakuan secara politis dan efisiensi biaya.
- Standar Perilaku, yaitu meliputi kewajiban formal, konflik kepentingan, keterbukaan kepada public, HAM, interaksi manusia, laporan secara seimbang antara pusat, daerah, individual dan instansi, serta tanggung jawab atas anggaran.
- Standar Akurasi/Ketepatan, yaitu meliputi identifikasi obyek, analisis konteks, menggambarkan tujuan dan prosedur, kebenaran sumber informasi, pengukuran yang valid dan reliable, control data secara sistematis, analisis informasi kuantitatif, analisis data kualitatif, kesimpulan secara adil dan laporan yang objektif.

## **2 Lembaga yang Terlibat dalam Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK**

Sinkronisasi pengembangan SMK berdasarkan potensi unggulan wilayah akan melibatkan banyak pihak (*stakeholders*) yang memiliki visi, misi, tujuan berbeda. Program kerjasama akan berjalan dengan baik jika

semua unsur yang terlibat dalam pengembangan memiliki pemahaman yang sama serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapainya. Dengan kata lain perlu dibentuk badan sinkronisasi pengembangan SMK berbasis keunggulan potensi wilayah yang beranggotakan pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan SMK. Pengelolaan kerjasama Pengembangan SMK diperlukan pemimpin yang mampu mengelola dan mengarahkan semua unsur organisasi untuk mencapai tujuan. Pemimpin badan tersebut perlu memiliki karakter berupa berjiwa entrepreneur, visioner, demokratis, transformatif dan pemimpin yang memberdayakan (Dardiri, 2015; Blanchard, 2007; Suyitno, dkk 2014). Agar diperoleh organisasi yang kuat maka penyusunan Struktur Organisasi harus mengakomodasi semua unsur terkait.

Pada bagian ini menjelaskan tentang sistem organisasi dan strategi pelaksanaan kegiatan. Sistem organisasi dan strategi pelaksanaan kegiatan pada sinkronisasi program pengembangan SMK ini sesuai dengan tahapan pengembangan program yang dijelaskan sebelumnya. Strategi pelaksanaan kegiatan dengan melakukan klarifikasi data hasil olahan, untuk mendapatkan tingkat kevalidan yang tinggi. Klarifikasi data bertujuan untuk mencari ada tidaknya GAP antara data hasil pemetaan dengan data konkrit (riil) di lapangan. Selain itu, strategi pelaksanaan kegiatan juga melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang merupakan kegiatan analisis diskusi terarah dalam melakukan validasi secara objektif. Sinkronisasi Program adalah proses pengembangan SMK berbasis potensi keunggulan wilayah. Sinkronisasi program dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah (Dinas Pendidikan Daerah). Pembentukan Badan melibatkan semua *stakeholders* SMK. Keanggotaan Badan Pengembang disesuaikan dengan kebutuhan dan cakupan kegiatan yang direncanakan.

Lembaga yang terlibat dalam melakukan Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK dengan prioritas potensi unggulan wilayah dan prioritas tenaga kerja yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, *Direktorat Pembinaan SMK*, Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), Pemerintah Daerah (Provinsi), Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Secara esensi lembaga tersebut dikelompokkan menjadi lembaga penyelenggara program dan lembaga pelaksana program.

#### 1) Lembaga Penyelenggara Program

Penyelenggaraan program sinkronisasi meliputi *Direktorat Pembinaan SMK* dan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang terpilih. Dalam hal ini, kedua lembaga tersebut merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam hal itu, Kemendikbud memegang amanat penting dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tidak lagi berada pada tingkat kabupaten/kota namun telah di tempatkan di provinsi. Manajemen pengelolaan pendidikan menengah serta penerbitan izin pendidikan menengah merupakan dua urusan yang saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dalam hal pengelolaan guru, menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pemerintah provinsi telah diberikan kewenangan untuk dapat memindahkan guru dan tenaga kependidikan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi. Khusus untuk pengelolaan guru dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

## 2) Lembaga Pelaksana Program

Lembaga atau instansi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK melibatkan beberapa instansi. Instansi tersebut meliputi Dinas Pendidikan Provinsi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan perwakilan beberapa SMK. Para pelaksana program sinkronisasi tersebut membentuk konsorsium institusi pelaksana untuk menentukan fokus kerja serta *step* dan *stage* setiap proses program sinkronisasi.

Selain itu, instansi kabupaten/kota juga merupakan komponen pendukung vital pelaksanaan program sinkronisasi. Instansi tersebut meliputi Dinas Pendidikan Kab/Kota, Bappeda Kab/Kota, Disnaker Kab.Kota dan instansi terkait lain. Instansi tersebut merupakan basis *recording* data untuk melakukan *updating* sesuai wilayah yang dinaunginya. Oleh karena itu, keaktifan instansi Kab/Kota berpengaruh besar terhadap daya *updating* di tingkat Provinsi.

### 1. Sarana dan Prasarana

Proses program sinkronisasi bidang keahlian di SMK memerlukan sarana prasarana untuk melaksanakan kegiatannya. Sarana dan prasarana tersebut merupakan alat dan pendukung utama dalam melaksanakan program sinkronisasi bidang keahlian. Pada semua prosesnya, memerlukan jaringan aktif internet sebagai media untuk melakukan eksplorasi website dan situs. Selain itu, sarana dan prasarana seperti perlengkapan elektronik (laptop, LCD, komputer PC, *smartphone*) yang memiliki spesifikasi tinggi juga tidak dapat diabaikan. Hal itu dikarenakan pada program sinkronisasi bidang keahlian di SMK ini teknik analisisnya melalui manual dan *blended*.

Di samping itu, diperlukan *homebase* agar semua informasi dapat tersalurkan dan tertata. Penentuan *homebase* dapat melalui letak strategis dari para anggota konsorsium. Pada proses sinkronisasi ini, tidak berlangsung dalam hitungan hari saja, namun bahkan bisa sampai hitungan bulan. Proses dalam melakukan sinkronisasi juga dapat terlaksana beberapa tahap (apabila diperlukan). Dengan kata lain, program sinkronisasi ini secara tidak langsung akan dapat membuat instansi pelaksana lebih “mesra” dan semakin konsisten bersama-sama untuk meningkatkan kualitas program masing-masing khususnya program untuk pendidikan kejuruan (SMK).

## **2. Pembiayaan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK**

Proses program sinkronisasi bidang keahlian di SMK berbasis prioritas potensi keunggulan wilayah memerlukan pendanaan. Pendanaan yang dimaksud disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan yang direncanakan. Perencanaan pendanaan harus dilakukan secara transparan melibatkan semua unsur organisasi badan sinkronisasi yang dibentuk. Sumber pendanaan dibebankan pada mata anggaran semua pihak yang terlibat yaitu konsorsium institusi pelaksana.

Pembiayaan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran, yang memuat kebijakan satuan biaya untuk SBK Sub-Keluaran Penelitian. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan jenis, bidang penelitian, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas dua pembiayaan, yaitu Standar Biyan Riset dan Standar Biaya Tambahan.

Justifikasi anggaran penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, dan bidang fokus

penelitian. SBK riset merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui. Rincian anggaran yang dibuat harus memuat SBK penelitian dan tambahan biaya luaran yang akan dicapai. Biaya SBK yang diusulkan sudah mencakup biaya mencapai luaran program yang ditargetkan sedangkan tambahan biaya luaran hanya diperuntukkan bagi luaran tambahan.

## BAB III

# MEKANISME PENYELENGGARA PROGRAM SINKRONISASI BIDANG KEAHLIAN DI SMK

### A. Konsorsium dan Mekanisme Kerja Penyelenggaraan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

Penyelenggara program sinkronisasi bidang keahlian di SMK melibatkan konsorsium penyelenggara program. Konsorsium merupakan institusi yang berwenang melaksanakan program sinkronisasi secara nasional. Konsorsium program sinkronisasi bidang keahlian di SMK disajikan pada Gambar 3.1.



**Gambar 3.1** Konsorsium Penyelenggara Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

Konsorsium penyelenggara program sinkronisasi dengan bidang keahlian di SMK meliputi Direktorat PSMK, tim naskah kebijakan Universitas Negeri Malang, Pemprov., LPMP, dan perwakilan SMK.

Hubungan kerja dan aktifitas antar dan setiap institusi penyelenggara program sinkronisasi bidang keahlian di SMK sebagaimana pada Gambar 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut.

[1] *Socializing*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah provinsi dan tim konsorsium (Direktoral PSMK dan Universitas Negeri Malang) terkait pengembangan SMK berbasis prioritas potensi unggulan wilayah. Hal itu dilakukan dengan menyelenggarakan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK.

[2] *Informing*. Konsorsium penyelenggara program sinkronisasi bidang keahlian di SMK dan pemerintah daerah provinsi menginformasikan dan memberikan sosialisasi lanjutan program tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Bappeda Provinsi, dan Disnaker Provinsi.

[3] *Recording*. Dinas Pendidikan Provinsi, Bappeda Provinsi, dan Disnaker Provinsi melakukan rekan data riil terhadap kondisi pada masing-masing instansi di kabupaten/kota.

[4] *Reporting*. Dinas Pendidikan Kab/Kota, Bappeda Kab/Kota, dan Disnaker Kab/Kota melaporkan data mereka sesuai dengan fungsi masing-masing instansi pada setiap instansi tingkat provinsi.

[5] *Co-ordinating*. Disnaker Provinsi dan Bappeda Provinsi melakukan kordinasi hasil repoting data yang kemudian dijadikan bahan sinkronisasi terhadap fokus program dari Dinas Pendidikan Provinsi.

[6] *Synchronizing*. Dinas Pendidikan Provinsi bersama-sama dengan Bappeda Provinsi dan Disnaker Provinsi melaksanakan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK. Program tersebut *dimonitoring* oleh LPMP sebagai lembaga Penjaminanan mutu pendidikan.

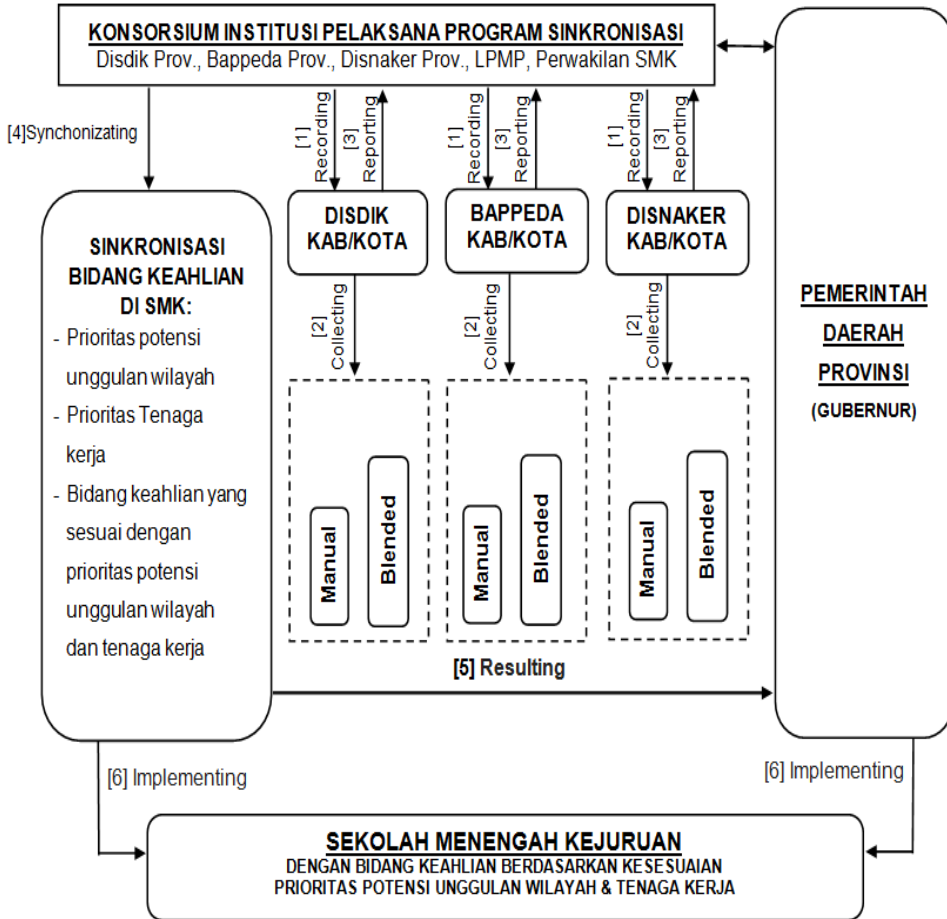
[7] *Resulting*. Hasil dari program sinkronisasi bidang keahlian di SMK dilaporkan kepada Konsorsium penyelenggara program dan pemerintah daerah provinsi yang kemudian merancang kebijakan

[8] *Implementing*. Dilanjutkan dengan implementasi oleh pemerintah daerah provinsi dibantu dengan konsorsium penyelenggara program melakukan tindak lanjut dengan merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan prioritas potensi unggulan wilayah.

## **B. Konsorsium dan Mekanisme Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK**

### **1 Konsorsium Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK**

Institusi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK melibatkan beberapa instansi sebagai konsorsium. instansi tersebut meliputi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan beberapa perwakilan SMK. Selain itu, instansi pada tingkat Kab/Kota juga berperan aktif dalam melakukan tahapan *recording* data agar data yang dianalisis merupakan data yang memiliki tingkat *ke-update-an* tinggi. Instansi tersebut meliputi Dinas Pendidikan Kab/Kota, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kab/Kota, dan Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota. Konsorsium institusi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK disajikan pada Gambar 3.2.



**Gambar 3.2** Konsorsium Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

Hubungan kerja dan aktifitas antar dan setiap institusi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK sebagaimana pada Gambar 3.2 dapat dijelaskan sebagai berikut.

[1] *Recording*. Konsorsium institusi pelaksana yang meliputi Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Provinsi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan beberapa perwakilan SMK melakukan perekaman data ke kabupaten/kota masing-masing instansi.

[2] *Collecting*. Dinas Pendidikan (Disdik) Kab/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab/Kota, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kab/Kota melakukan pengambilan data. Teknik yang digunakan melalui teknik manual (observasi & survei) dan teknik *blended* melalui eksplor *website* dan situs terkait.

[3] *Reporting*. Hasil dari tahap *collecting* dijadikan bahan dan dasar instansi provinsi (Disdik, Bappeda, Disnaker) untuk melakukan sinkronisasi.

[4] *Synchronizing*. Sinkronisasi dilakukan oleh konsorsium institusi pelaksana program dengan fokus hasil pada Prioritas potensi unggulan wilayah, Prioritas Tenaga kerja, dan Bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas potensi unggulan wilayah dan tenaga kerja

[5] *Resulting*. Hasil dari sinkronisasi diteruskan kepada pemerintah daerah provinsi (Gubernur) untuk diimplementasikan.

[6] *Implementing*. Tahap implementasi hasil sinkronisasi (kebijakan atau Pergub) terkait revitalisasi pendidikan SMK dengan bidang keahlian berdasarkan prioritas potensi unggulan wilayah dan prioritas tenaga kerja.

## **2 Mekanisme Kerja Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK**

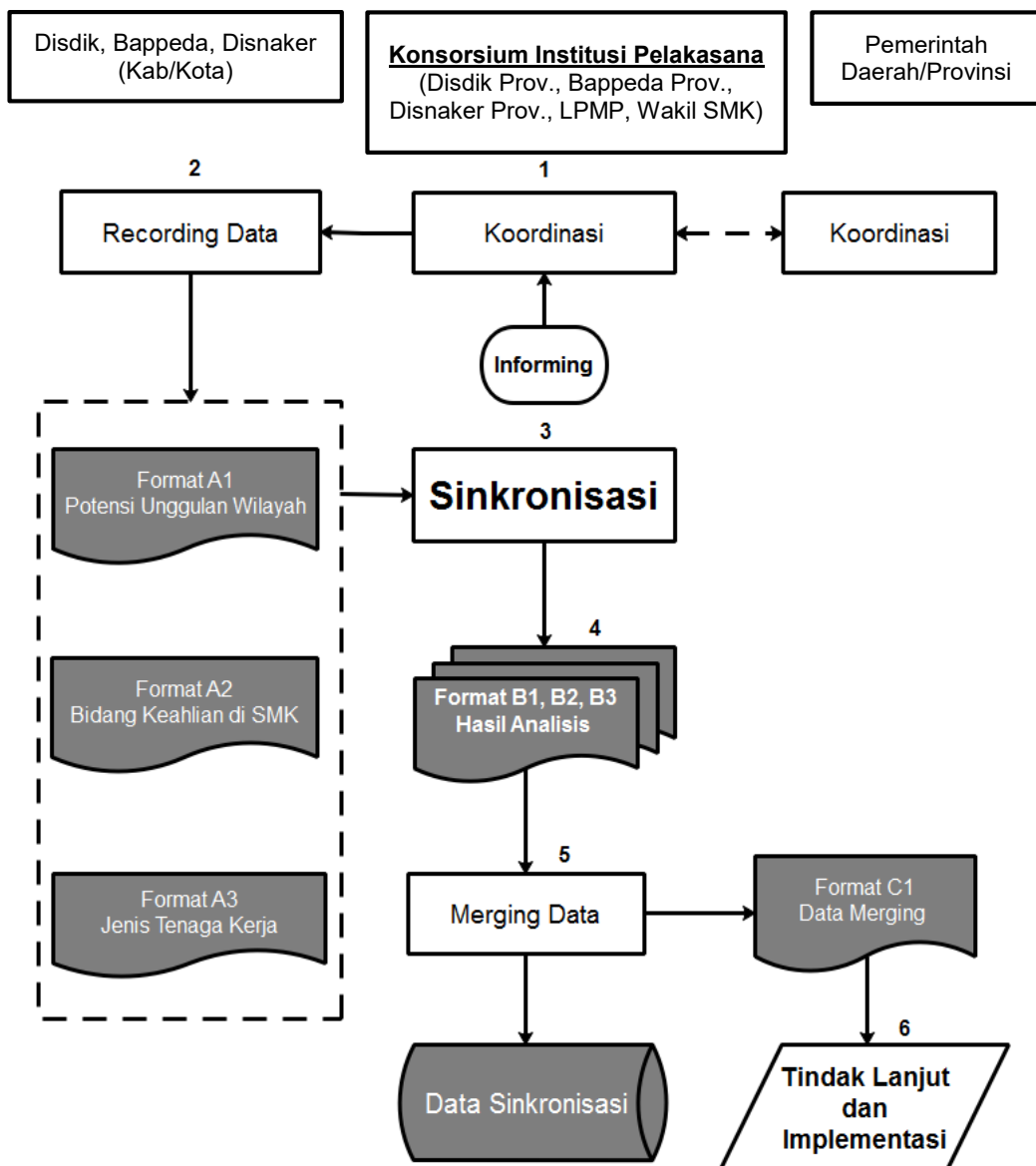
Pada pelaksanaan program sinkronisasi, mekanisme kerja institusi pelaksana dimulai dari rapat koordinasi oleh konsorsium institusi pelaksana. Koordinasi tersebut sebagai sarana untuk *job-cekking* agar

setiap proses yang dilakukan dapat berjalan sesuai target dan rencana.

Institusi pelaksana meliputi:

1. Pemerintah Daerah (Provinsi) dalam hal ini Gubernur
2. Konsorsium Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK. Anggota Konsorsium Institusi pelaksana yaitu:
  - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi
  - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi
  - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi
  - Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
3. Disdik Kab/Kota, Bappeda Kab/Kota, dan Disnaker Kab/Kota
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai perwakilan

Institusi pelaksana tersebut saling berkordinasi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mekanisme kerja institusi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK dijelaskan pada Gambar 3.3.



**Gambar 3.3 Mekanisme Kerja Institusi Pelaksana Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK**

*Flowchart* pada Gambar 3.3 menjelaskan mekanisme kerja institusi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK. Uraian masing-masing proses dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Konsorsium institusi pelaksana program sinkronisasi bidang keahlian di SMK melakukan koordinasi untuk menentukan tahapan proses recording dan collecting data di tingkat kab/kota.
2. Institusi tingkat kab/kota (Disdik, Bappeda, Disnaker) melakukan proses recording dan collecting data pada masing-masing lembaganya. Data tersebut berupa potensi unggulan wilayah, ragam bidang keahlian, dan jenis tenaga kerja. Selanjutnya, data tersebut diisikan pada **Format A1, Format A2, dan Format A3**.
3. Setelah proses pengisian pada **Format A1, Format A2, dan Format A3** selesai, maka proses selanjutnya yaitu kegiatan sinkronisasi. Konsorsium institusi pelaksana melakukan proses analisis yang meliputi analisis (1) prioritas potensi unggulan wilayah, (2) prioritas jenistenaga kerja, dan (3) kesesuaian ragam bidang keahlian di SMK.
4. Hasil sinkronisasi yang telah dilakukan oleh Konsorsium institusi pelaksana program *dientry* pada **Format B1, Format B2, dan Format B3**. Format tersebut merupakan isian data hasil analisis dari tahap sinkronisasi.
5. Konsorsium institusi pelaksana melakukan *merging* data hasil sinkronisasi yang kemudian menggunakan **Format C1**. Hal itu dilakukan agar data hasil dari **Format B1, Format B2, dan Format B3** dapat tersinkronkan dengan kompleks dan holistik.
6. Pemerintah daerah/provinsi menerima dokumen **Format C1** untuk mengimplementasikan hasil dari program sinkronisasi bidang keahlian di SMK.

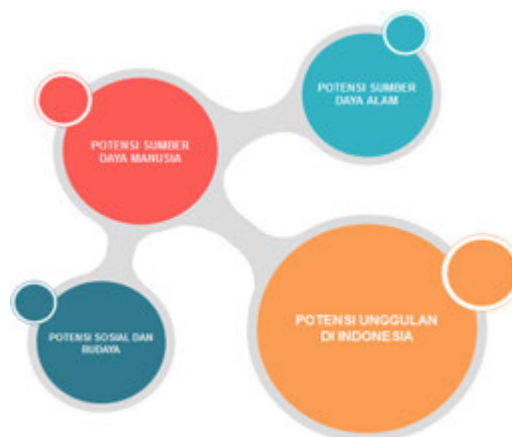
## BAB IV

# TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM SINKRONISASI BIDANG KEAHLIAN DI SMK

### A. Analisis dan Penetapan Prioritas Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

#### 1 Analisis Prioritas Potensi Unggulan Wilayah

Apabila dianalisis secara holistik, potensi daerah di Indonesia merupakan sebuah kemampuan dasar yang dimiliki oleh suatu daerah di Indonesia baik dalam sumber daya alam, sosial budaya maupun sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan sehingga menghasilkan suatu nilai tambah bagi daerah itu sendiri. Pembangunan suatu daerah dikatakan berhasil apabila memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul (Hamdani, 2016). Ragam potensi unggulan di Indonesia disajikan pada Gambar 4.1.

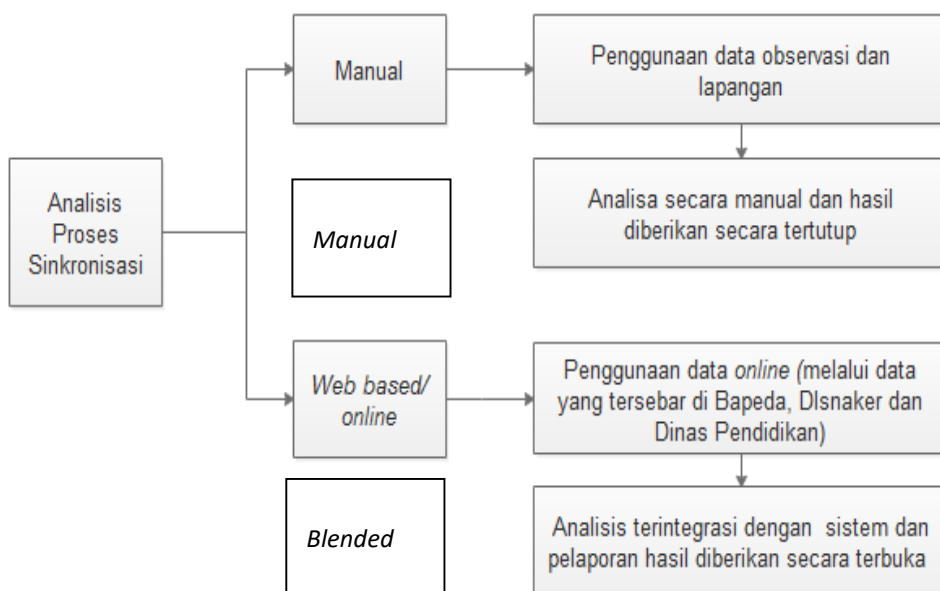


**Gambar 4.1 Ragam Potensi Unggulan di Indonesia**

Program Peta Prioritas Potensi Unggulan dalam Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK merupakan upaya melaksanakan tujuan dari Inpres No 9 Tahun 2016, yang mempunyai tujuan utama membuat SMK

Unggulan berbasis potensi, hal ini senada dengan program sinkronisasi karena berfokus pada relevansi SMK dengan bidang keahlian. Analisis prioritas dilakukan dalam 2 tahap utama, yakni tahap manual dan tahap *web based/online*. Pada tahap manual analisis prioritas dilakukan secara mandiri, dalam artian dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara pada pihak yang terkait, dengan sistematis jempot bola, hal ini diharapkan menjadi data valid sebagai dasar penetapan naskah kebijakan SMK di Seluruh Indonesia, untuk alur yang lebih jelas disajikan pada Gambar 4.2. Sedangkan analisis prioritas *web based/online* dilakukan berdasarkan data yang tersebar di internet, data tersebut valid apabila menampilkan *source data*. Mekanisme selanjutnya adalah menganalisis melalui *website* yang sudah dibuat terkait kesesuaian SMK, jumlah SMK dan bidang keahlian yang ada, kemudian keputusan akhir terkait kesesuaian SMK dapat langsung diberitahukan melalui *website*. Tahapan ini diharapkan memangkas jarak dan waktu informasi yang disebarkan, sehingga SMK dipelosok Indonesia tahu terkait kebijakan SMK tersebut.

Analisis prioritas SMK juga khusus untuk mengetahui secara jelas kebutuhan SMK setiap daerah, menurut studi lapangan literatur, setiawan (2017) menyampaikan daerah/wilayah membutuhkan SMK yang dapat mengangkat hasil daerahnya, semisal bidang keahlian pertambangan yang menjadi salah satu kekayaan di Indonesia, namun SMK dibidang itu masih sedikit.



**Gambar 4.2 Alur Analisis Proses Sinkronisasi**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci didalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta daya saing tinggi dalam persaingan global yang semakin terbuka. Mengingat sejak Tahun 2015 Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN (*Association South Each Asia Nation*) melalui penandatanganan *Asean Economic Community (AEC)* atau yang dikenal MEA (*Masyarakat Ekonomi ASEAN*) oleh masyarakat Indonesia.

Hasil analisis sektor kemaritiman di Indonesia, dapat dipaparkan bahwa merupakan dua pertiga dari luas seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sangat banyak. Antara lain berbagai macam ikan, udang, kerang, rumput laut serta mutiara. Selain itu berbagai bahan tambang juga terkandung di dalam lautan (Manik, 2014). Laut dan selat (laut sempit) yang termasuk wilayah Indonesia antara lain

Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Sunda, dan Selat Karimata. Perairan darat merupakan perairan yang berair tawar. Yang termasuk perairan darat adalah sungai, danau dan waduk. Perairan darat dapat dimanfaatkan untuk olah raga, sarana transportasi, rekreasi, perikanan dan pertambangan. Air yang bertenaga seperti air terjun juga dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Beberapa contoh perairan daratan di Indonesia antara lain Sungai Kapuas (Kalimantan), Sungai Bengawan Solo (Jawa Tengah), Waduk Jatiluhur, Sungai Musi (Sumatera), Danau Toba (Sumatera), Danau Poso, dan Waduk Gajah Mungkur.

Pada Potensi sosial budaya, Indonesia memiliki berbagai jenis dan type. Potensi sosial budaya tersebut merupakan potensi yang terdapat di kehidupan masyarakat. Berbagai jenis kesenian daerah dan adat istiadat merupakan contoh potensi sosial budaya. Bentuk-bentuk kesenian tersebut dapat menjadi potensi suatu daerah yang unggulan (Habib, 2015). Diantaranya yaitu seni tari. Seni tari memiliki berbagai jenis. Misalnya yaitu seni taru tradisional. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki tarian khas dan unik. Contohnya Tari Piring dari Sumatera Barat, Tari Kecak dari Bali dan Tari Nelayan dari Maluku. Selain itu, terdapat juga bidang seni pertunjukan. Seni pertunjukan disebut juga dengan seni pentas. Drama, wayang serta teater merupakan contoh seni pertunjukan. Contoh seni pertunjukan di Indonesia adalah Wayang Golek (Jawa Barat), Lenong (Betawi), dan Ogoh-ogoh (Bali). Selain seni tari dan seni pertunjukan, potensi budaya Indonesia yaitu seni musik tradisional. Seni musik tradisional meliputi lagu dan alat musik tradisional. Contoh lagu daerah antara lain Lagu Apuse (Papua), Ampar-ampar Pisang (Kalimantan Selatan), Kicir-kicir (DKI Jakarta) dan Soleram (Riau). Selain itu, potensi budaya di Indonesia juga memiliki keragaman yang kompleks pada seni rupa. Seni rupa terdiri dari berbagai bentuk, yaitu seni pahat, seni patung dan seni ukir.

## 1. Penetapan Prioritas Unggulan Wilayah

Penetapan prioritas potensi unggulan wilayah merupakan acuan dalam penetapan prioritas yang ada dalam program peta prioritas potensi unggulan dalam sinkronisasi bidang keahlian di SMK penetapan tersebut berdasarkan data konkrit yang terdapat dalam lapangan dan studi empiris yang telah dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Salah satu cara menetapkan prioritas adalah dengan analisis USG (*urgensi, seriousness dan growth*) yakni dengan cara memberikan skor terhadap persoalan yang sudah teridentifikasi. Skor yang diberikan merupakan akumulasi dari skor 1-7 terhadap tiga komponen USG.

- (1) tingkat urgensi (U) untuk dipecahkan, apa dan seberapa besar dampaknya jika tidak dipecahkan
- (2) tingkat keseriusan (S) tekanan yang timbul
- (3) tingkat kekuatan dan kemungkinan akan menjadi isu yang dipecahkan berkembang (G) menjadi persoalan baru yang lebih kompleks.

Contoh dari penentuan skoring dengan USG (*urgensi, seriousness dan growth*) sebagaimana Tabel 4.1.

**Tabel 4.1. Format Pemberian Skor Prioritas dengan Analisis USG**

No	Persoalan	U	S	G	Jumlah	Ranking	Skala Prioritas

Keterangan:

Nilai 7 = sangat besar

Nilai 1 = sangat kecil

Skor yang diberikan untuk memberikan penilaian tersebut digunakan skala penentuan alternatif penyelesaian masalah yang menjadi prioritas, digunakan metode teknik *CARL* (*Capability, Accesibility, Readness, Leverage*), dengan memberikan skor pada tiap alternatif penyelesaian masalah dari 1-7 dimana 1 berarti sangat kecil dan 7 berarti sangat besar atau harus diprioritaskan. Metode *CARL* merupakan cara pandang dalam menilai alternatif penyelesaian masalah sebagaimana dikemukakan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Skor Penilaian Skala Prioritas**

No	Persoalan	C	A	R	L	Jumlah	Ranking	Skala Prioritas

*Capability* merupakan penilaian terhadap kesediaan sumberdaya untuk mendukung implementasi tindakan, *accesibility* kemudahan untuk dilaksanakan, *readiness* adalah kesiapan pengguna untuk melaksanakan program, dan *leverage* seberapa besar pengaruh dengan yang lain.

## **B. Action Plan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK**

### **1 Action Plan Program Manual**

*Action plan* (*Rencana Tindakan*) program sinkronisasi bidang keahlian di SMK merupakan langkah awal yang mutlak dilakukan untuk membuat perubahan SMK. Action plan yang dirancang hendaknya dalam

memenuhi 5 (lima) kriteria *SMART* merupakan akronim *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timebound*. Kelima aspek *SMART* tersebut akan membantu pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

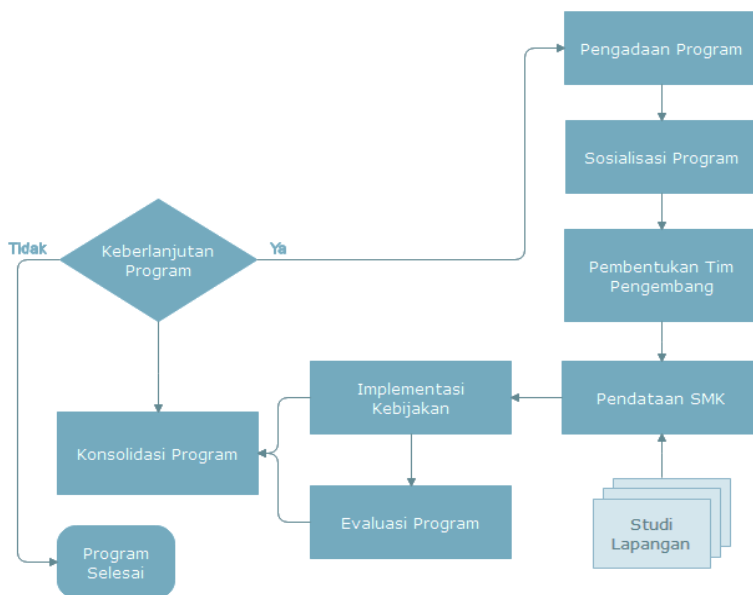
Langkah pertama dalam membuat action plan menentukan tujuan utama program. Tujuan utama program tersebut berdasarkan pada hasil penetapan/penilaian skala prioritas. Selanjutnya tujuan utama tersebut dijabarkan secara detail menjadi aktivitas dan tugas-tugas untuk melakukan tindakan. *Action plan* juga menjadi arah yang jelas atas awal dan akhir perubahan yang direncanakan *action plan* juga bisa merepresentasikan proses perubahan yang dinamis. Jika diperlukan juga dapat mengakomodasi perubahan saat informasi baru muncul. *Action plan* dibuat tentunya didasarkan atas prioritas permasalahan sosial yang terjadi. Permasalahan ini disebut sebagai *problem statement*. Permasalahan harus mampu mewakili atau menjelaskan permasalahan yang menjadi dasar perubahan sosial (program sinkronisasi bidang keahlian di SMK) yang akan dilakukan.

*Problem statement* harus dibuat secara spesifik dan operasional pada pelaksanaannya. Artinya dikembangkan berdasarkan indikator-indikator prioritas permasalahan dengan hasil USG dan CARL. Kriteria spesifik di sini salah satunya meliputi objek riil yang dituju. Selanjutnya dari aktivitas ditetapkan target alokasi waktu penyelesaian masing-masing kegiatan. Di samping itu juga ditetapkan siapa yang harus melakukan tindakan, serta peralatan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan. Butir-butir yang dirancang dalam action plan diungkapkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Format Penyusunan Action Plan

No	Tujuan	Kegiatan	Indikator Pencapaian	Sasaran Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bahan dan Media	Pelaksana Kegiatan

Action Plan program manual dilakukan untuk mengetahui langkah awal dalam merencanakan program, bentuk dari action plan menggunakan *Flow Chart* dan Tabel Rencana Tindak Manual. Action Plan program manual dipaparkan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Mekanisme *Action Plan* Program Manual

Pada Diagram Alir (*Flow Chart*) dimulai dengan pengadaan program peta prioritas potensi unggulan dalam sinkronisasi bidang

keahlian di SMK yang diadakan oleh Direktorat PSMK Kemdikbud. Sosialisasi program dilakukan setelah *action plan* dan perangkat pendukung siap. Sosialisasi tersebut dikordinasi oleh konsorsium sehingga jelas pada tujuan dan target sosialisasi. Langkah selanjutnya adalah pendataan SMK melalui observasi dan studi lapangan. Hasil dari pengumpulan data tersebut digunakan sebagai acuan implementasi kebijakan.

Tabel rencana tindak manual difungsikan untuk mengelola kegiatan program sinkronisasi yang sudah dijelaskan pada Gambar 4.3. Tabel Rencana dimulai dengan penjabaran kegiatan, kemudian dijabarkan permasalahan/hambatan beserta cara mengatasi. Pada kolom 3 diisi dengan Indikator Keberhasilan program yang dipadu dengan sasaran program (umum/khusus), kemudian baru dijabarkan kembali penanggung jawab program, target waktu dan output program, secara jelas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Rencana Tindak Manual Program

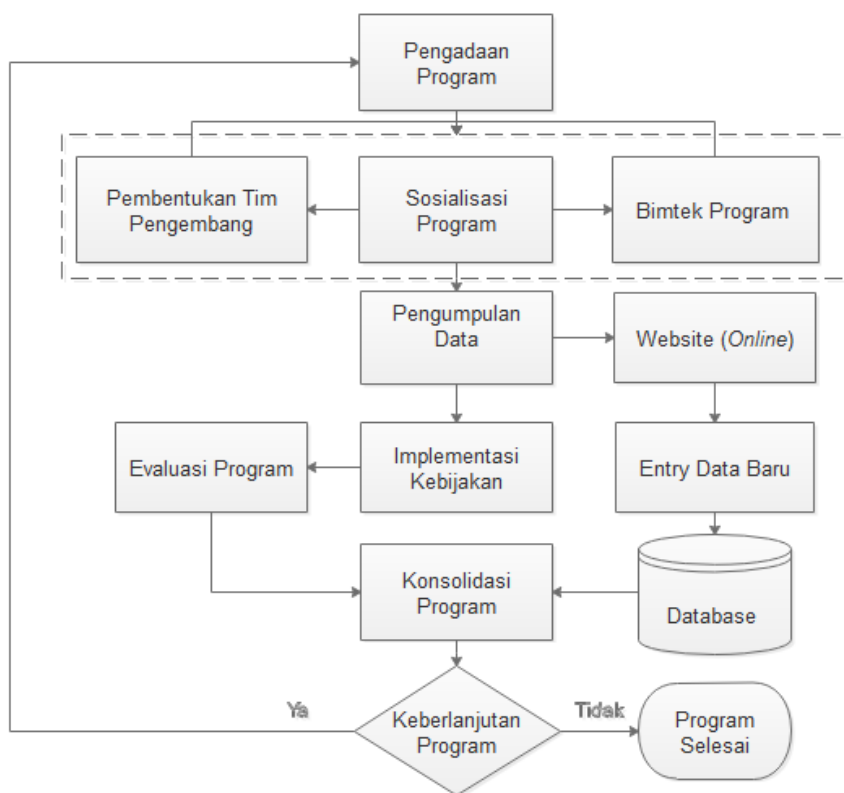
No	Kegiatan	Hambatan	Cara Mengatasi	Indikator Keberhasilan	Sasaran	Penanggung Jawab	Dokumen terkait	Target Waktu	Output
1	Sosialisasi Peta Prioritas Potensi Unggulan Dalam Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK	Ketersediaan Dana Ketersediaan SDM Sarana Pedukung Kerjasama dengan Instansi Lain (Bapeda & Disnaker)	Koordinasi Pendanaan Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Sarana Permohonan dukungan pengambil Keputusan Dinas Pendidikan	Tersedianya Dana Tersusun Rencana Kegiatan Tersedianya sarana Adanya dukungan dari pengambil Keputusan	Kepala SMK Seluruh Provinsi di Indonesia	1. Dinas pendidikan 2. DISNAKER 3. BAPEDA	Naskah Kebijakan	1 bulan	Persamaan persepsi Peta Prioritas Potensi Unggulan Dalam Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK 2. Surat Keputusan Kepala Direktorat PSMK
2	Pembentuk Tim Pengembang	Terbatasnya SDM di Kab / Kota	Sosialisasi kepada : Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMK	Terbentuknya Tim Pengembang Peta Prioritas Potensi Unggulan	Dinas Pendidikan dan Kepala SMK Provinsi Indonesia	Direktorat PSMK	Pedoman Kerja	1 minggu	Terbentuknya Tim Pengembang Prioritas Potensi Unggulan Ber



		Bidang Keahlian di SMK	Bidang Keahlian di SMK	
6	Konsolidasi Program	-	-	
		Evaluasi keberlanjutan program	Tim Pengembang	Ketua Pengembang
				Hasil temuan lapangan
				1 bulan
				Kebijakan keberlanjutan program

### C. Action Plan Program Blended

Selain secara manual, program sinkronisasi juga dilakukan dengan secara Blended yaitu program manual fasilitasi elektronik (web). Hal itu agar keholistikkan dari hasil program sinkronisasi bidang keahlian di SMK memiliki tingkat relevansi yang tinggi. *Action plan* program *Blended* dilakukan secara manual fasilitasi elektronik (web) dijelaskan pada Gambar 4.4.



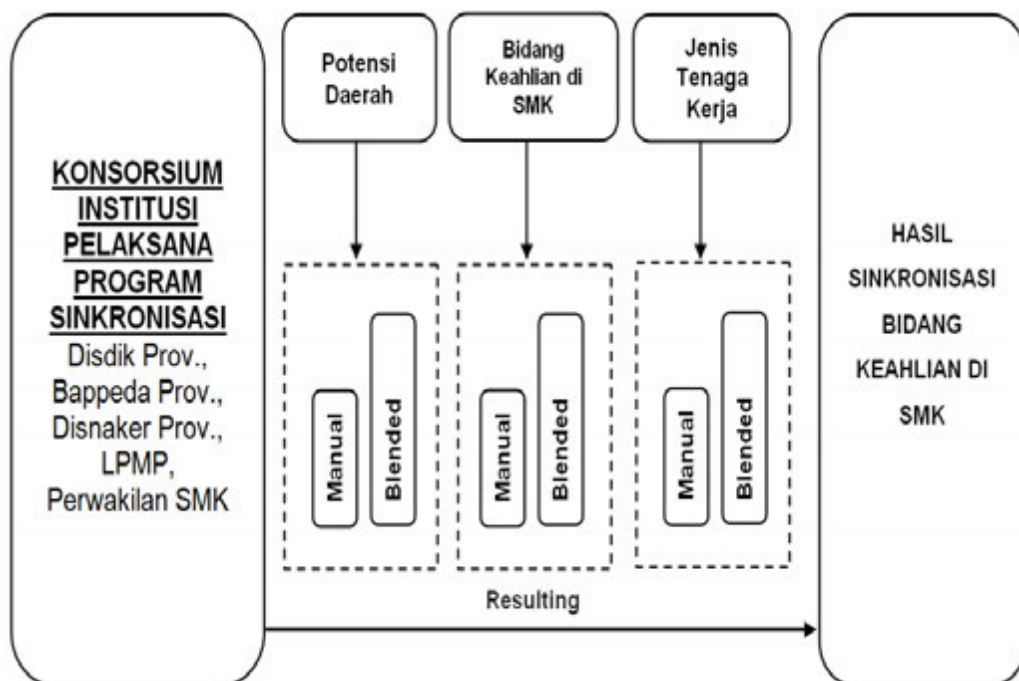
**Gambar 4.4 Mekanisme Action Plan Program *Blended***

Pada program *Blended* difasilitasi dengan situs alamat [www.mapping-smk.com](http://www.mapping-smk.com). Pada *website* tersebut, pengguna (*user*)

dibedakan menjadi dua tipe (jenis). Jenis pertama yaitu *user* sebagai admin (pengelola). *User* sebagai admin, mampu *login* dan melakukan *entry* data terkait dengan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK. Selain itu, pada *user* admin, dapat melakukan *upgrading* data pada *database*. Jenis *user* kedua yaitu *user guess* (*user* tamu/pengunjung). Pada *user* tipe ini, *user* hanya sebagai pengunjung dan tidak ada fasilitas untuk *login* atau merubah data. Tipe *user* ini diperuntukkan untuk khalayak umum yang melihat data sinkronisasi bidang keahlian di SMK.

### **1 Proses/Langkah-langkah Sinkronisasi**

Proses atau langkah-langkah sinkronisasi dimulai dengan Mengidentifikasi program kerja beserta perangkat pendukung sinkronisasi yang berbentuk studi pendahuluan berupa observasi awal terhadap pemetaan wilayah unggulan yang kemudian dijadikan rancangan terhadap sinkronisasi program. Selanjutnya, Kerjasama berupa konsorsium menggali dan memetakan permasalahan potensi unggulan wilayah yang kemudian saling berkoordinasi untuk menentukan kebutuhan bidang keahlian SMK di setiap wilayah Indonesia. Proses sinkronisasi tersebut dilakukan dengan analisis data melalui manual dan *blended*. Hal itu dikarenakan untuk mempermudah dari masing-masing instansi mengakses *database* yang diperlukan. Proses atau langkah tersebut disajikan pada Gambar 4.5.



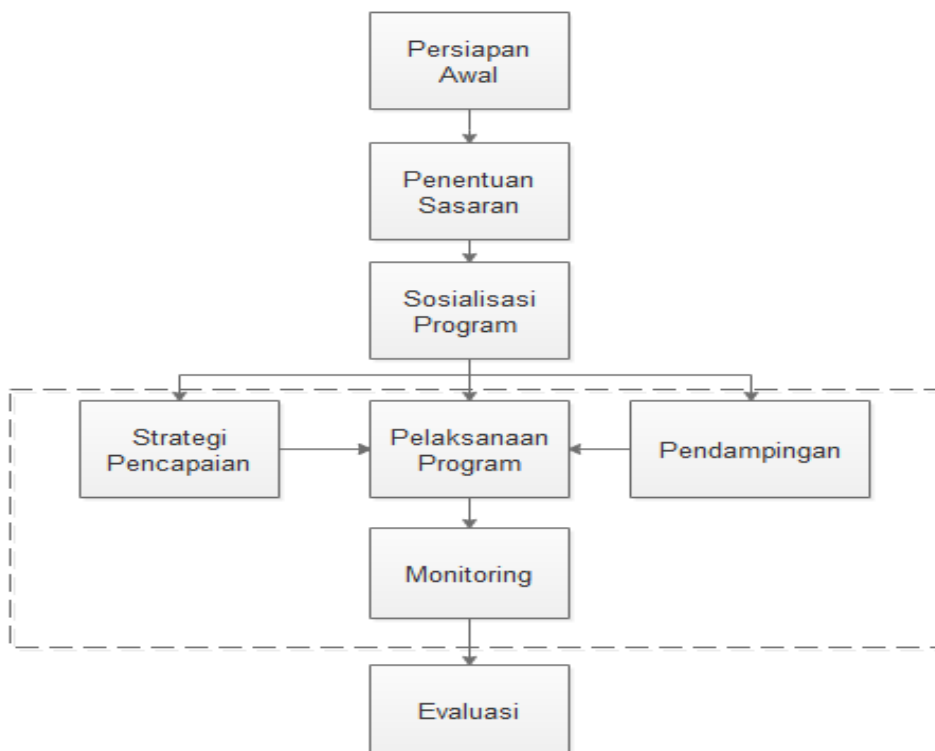
**Gambar 4.5 Mekanisme Proses Sinkronisasi**

Dinas Pendidikan (Disdik) Kab/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab/Kota, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kab/Kota melakukan pengambilan data. Teknik yang digunakan melalui teknik manual (observasi & survei) dan teknik *blended* melalui eksplor website dan situs terkait. Sinkronisasi dilakukan oleh konsorsium institusi pelaksana program dengan fokus hasil pada prioritas potensi unggulan wilayah, prioritas tenaga kerja, dan bidang keahlian yang sesuai dengan prioritas potensi unggulan wilayah dan tenaga kerja. Tahap implementasi hasil sinkronisasi (kebijakan atau Pergub) terkait pendidikan SMK dengan bidang keahlian berdasarkan prioritas potensi unggulan wilayah dan prioritas tenaga kerja.

## **2 Langkah-Langkah Pelaksanaan Penetapan Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK**

### **Langkah-Langkah Pelaksanaan Penetapan Sinkronisasi Secara Manual**

Langkah-langkah pelaksanaan penetapan sinkronisasi bidang keahlian dilakukan untuk menentukan pelaksanaan penetapan sinkronisasi sudah berjalan secara maksimal atau belum, langkah-langkah tersebut berkenaan dengan keterlibatan lembaga terkait dan sosialisasi program yang perlu dilakukan agar keterserapan informasi dapat berjalan secara maksimal. Didalam pelaksanaan program sendiri terdapat beberapa tahapan yang menjadi topik khusus yang dapat menjadi acuan ketercapaian program, diantaranya Strategi Pencapaian, Pendampingan dan Evaluasi. Pada langkah awal, yaitu persiapan program dari tingkat pusat sampai sekolah. Selanjutnya, dilakukan penentuan Provinsi dan Kab/Kota Sasaran. Setelah itu, proses pelaksanaan program sinkronisasi oleh konsorsium institusi pelaksana program. Selanjutnya, dilakukan monitoring terhadap adanya hambatan dan hasil dari sosialisasi program. Langkah akhir yaitu evaluasi program untuk mengetahui adanya ketidaksamaan persepsi terhadap adanya program. Langkah-langkah pelaksanaan sinkronisasi secara manual dijelaskan pada Gambar 4.6.

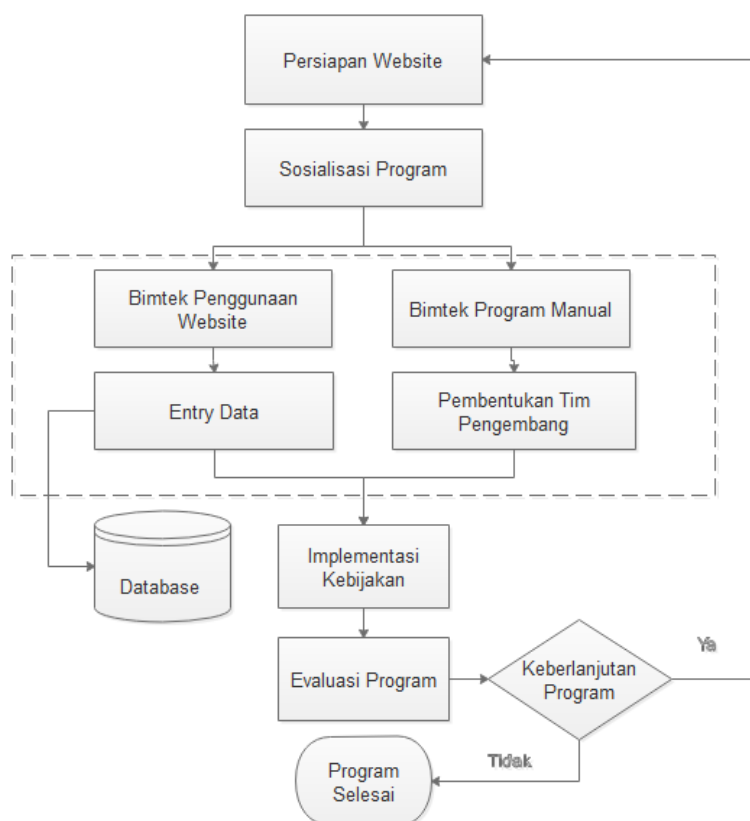


**Gambar 4.6 Skema Langkah-Langkah Secara Manual**

#### **Langkah-Langkah Pelaksanaan Penetapan Sinkronisasi Secara *Blended***

Tahapan *Blended* dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan secara manual fasilitasi online, hal ini diharapkan mempermudah kolektif data pada tahap analisis. Secara *Blended* tahapan dilakukan dengan menyiapkan *website* sebagai pengelola informasi, kemudian melakukan bimbingan teknis pada calon administrator *web*, pelaksanaan penginputan data dan melalui serangkaian *matching data* yang dihubungkan dengan *database*. Langkah-langkah pelaksanaan

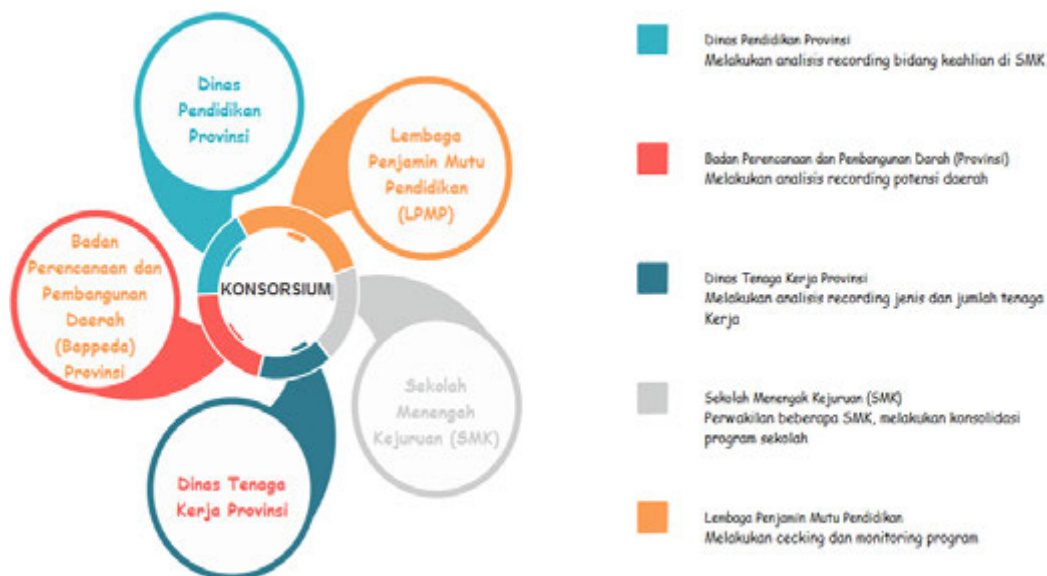
penetapan sinkronisasi secara *blended*, juga bertujuan untuk memudahkan para pengelola maupun pembaca (*user guess*) dalam melakukan akses data dan informasi. Selain itu, informasi yang diakses akan lebih cepat sampai kepada masing-masing individu dan meningkatkan efek portabilitas dalam melakukan monitoring proses. Secara rinci tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.7.



**Gambar 4.7 Langkah-Langkah Penetapan Sinkronisasi Secara *Blended***

#### D. Lembaga yang Terlibat pada Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

Program sinkronisasi bidang keahlian di SMK ini melibatkan beberapa lembaga dalam pelaksanaannya. Lembaga tersebut masing-masing memegang fungsi dan sebagai *shareholder*. Hal itu dikarenakan program ini merupakan program *merging* yang merekombinasikan tujuan dan program-program dari para lembaga yang terlibat. Selanjutnya, lembaga tersebut membentuk sebuah konsorsium. Lembaga yang terlibat pada program sinkronisasi bidang keahlian di SMK dijelaskan pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Lembaga yang Terlibat Proses Sinkronisasi

## E. Sosialisasi Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

### 1 Dinas di Provinsi (Dinas Pendidikan, Bappeda, Disnaker)

Sosialisasi Sinkronisasi program pemetaan wilayah unggulan dimulai dengan sosialisasi Dinas Pendidikan Provinsi dengan 5 tahapan. Pada Gambar 4.9 disajikan tahapan sosialisasi program (tingkat provinsi).



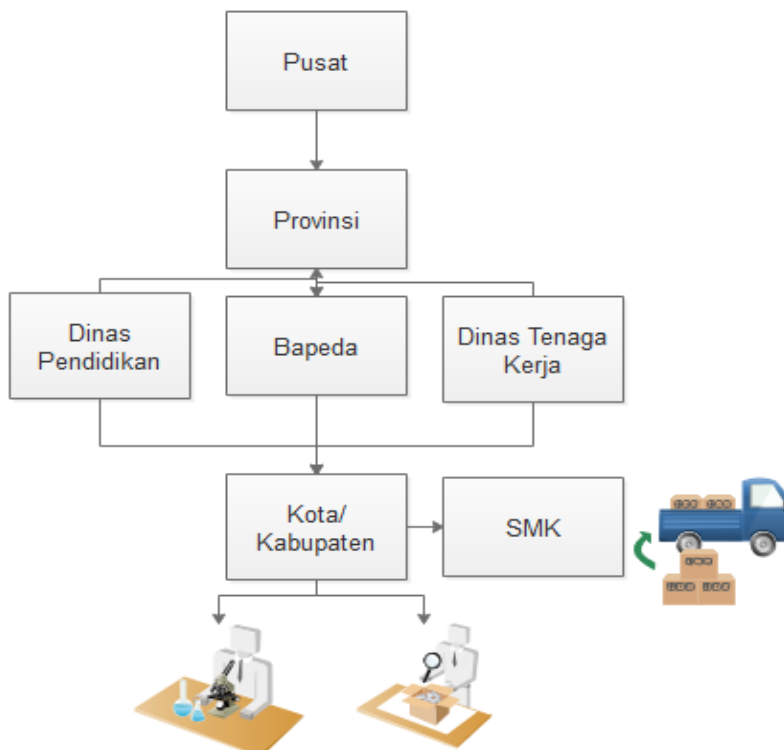
**Gambar 4.9 Sosialisasi Program Sinkronisasi (Tingkat Provinsi)**

Pada tahapan pertama *Preparing* dilakukan untuk mempersiapkan sosialisasi, mulai dari rencana anggaran biaya, jadwal kegiatan dan output yang dihasilkan. Tahap kedua *Doing* dilakukan untuk merumuskan aspek-aspek yang mendasari pemetaan potensi beserta kendala-kendala yang akan dihadapi, Pada Tahap ketiga ketiga dilakukan evaluasi menyeluruh program sinkronisasi dengan mengatasi kendala yang dijumpai dilapangan. Selanjutnya, tahap *Revising* untuk merevisi keterkaitan program dengan rancangan program yang dilakukan agar tidak terjadi asumsi eror program, dan yang terakhir pada tahap kelima yaitu

*Consolidating* dilakukan untuk monkosultasikan akhir program dan keberlanjutan program sinkronisasi program.

## 2 Lembaga Kabupaten/Kota

Sosialisasi tahap Lembaga Kabupaten/ Kota dilaksanakan berdasarkan prinsip kebutuhan setiap wilayah. Sosialisasi tersebut terkait latar belakang program dan dampak yang akan dihadapi ketika program dilakukan, pada tahap ini program sosialisasi dilakukan menyeluruh disetiap kabupaten/kota di Indonesia, secara rinci disajikan pada Gambar 4.10.



**Gambar 4.10 Langkah Sosialisasi Hasil Sinkronisasi (Tingkat Kab/Kota)**

### 1. SMK di Setiap Provinsi

Sosialisasi tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dilakukan untuk memberikan informasi sekaligus pemahaman terkait potensi unggulan wilayah yang terkait dengan pengembangan SMK dimasa depan. Sosialisasi kepada SMK di setiap provinsi bukan berarti untuk *judgement* SMK yang tidak sesuai harus dibubarkan, namun lebih menitik beratkan aspek demand dan supply. Sosialisasi tersebut difungsikan untuk memberikan gambaran kepada SMK terkait permasalahan yang akan ditimbulkan apabila SMK tidak sesuai dengan potensi unggulan wilayah daerah, hal ini perlu disosialisasikan sejak dini untuk memberikan sudut pandang kebermanfaatannya bagi SMK.

## BAB V

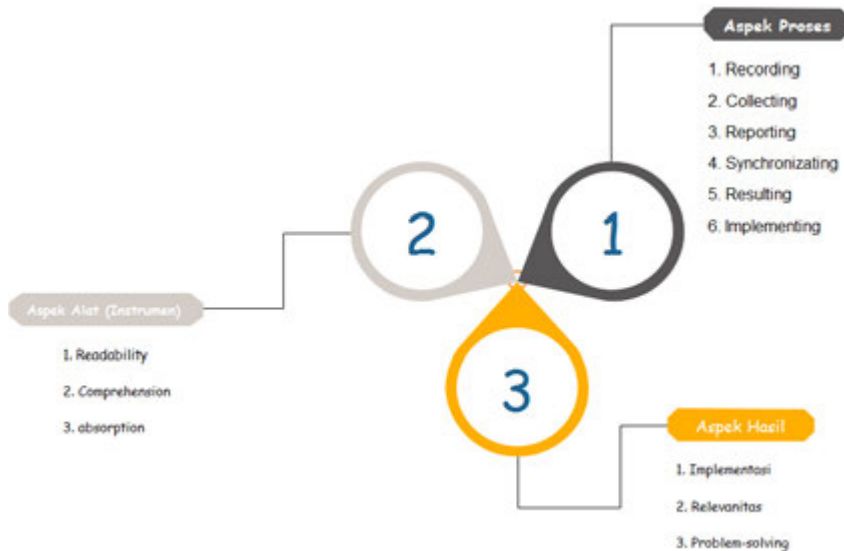
# EVALUASI DAN MONITORING

### A. Aspek yang dievaluasi

Evaluasi dan monitoring merupakan salah satu kegiatan manajemen yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di

SMK. Evaluasi dan monitoring juga dilakukan untuk mengendalikan seluruh program mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan. Selain itu evaluasi juga digunakan untuk mengetahui kendala dan *alternative* solusi dalam pelaksanaan program. Tujuan dari monitoring dan evaluasi tidak lain agar pencapaian pelaksanaan program yang efektif dan efisien.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan prinsip profesional, obyektif, transparan, akuntabel dan terus menerus. Monev dilakukan secara profesional artinya pelaksana evaluasi harus memahami dan menguasai substansi kegiatan yang dilakukan. Objektif mengandung makna agar monev dilakukan secara jujur dan mengungkap fakta yang sebenarnya. Semua pihak yang terkait harus mengembangkan kejujuran dan kesungguhan dalam melaksanakan program. Transparan memberikan arahan agar pihak pelaksana evaluasi dan yang dievaluasi mengetahui segala aspek yang terkait dengan monitoring seperti instrumen yang digunakan dan tolok ukurnya. Akuntabel bermakna semua kegiatan dilakukan dapat dan bisa mudah dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Sedangkan evaluasi harus dilakukan secara terus menerus pada setiap tahap manajemen. Aspek yang dievaluasi dipaparkan pada Gambar 5.1.



**Gambar 5.1 Aspek yang Dievaluasi**

Pada Gambar 5.1 memaparkan bahwa aspek yang dievaluasi pada program sinkronisasi bidang keahlian di SMK meliputi tiga aspek, yaitu aspek proses, aspek alat (instrument) dan aspek hasil. Pada aspek proses, hal yang perlu dievaluasi yaitu *recording*, *collecting*, *reporting*, *synchronizing*, *resulting*, dan *implementing*. Pada proses *recording* dan *collecting*, evaluasi dilakukan terhadap hambatan yang nampak saat pengambilan data dilakukan. Misalnya terkait kesulitan mendapatkan data terbaru (*update data*). Hal itu dilakukan karena proses tersebut merupakan proses awal dalam melakukan kajian data yang diperlukan selama program berlangsung. Selanjutnya pada proses *reporting* dan *synchronizing*, yaitu pelaporan hasil data dan proses sinkronisasi bidang keahlian. Pelaporan data merupakan hasil analisis dan olahan data mentah pada proses sebelumnya. Sedangkan pada proses sinkronisasi, data hasil olahan tersebut di *merging* untuk mendapatkan hasil yang relevan. Pada proses ini, memegang peranan vital untuk penentuan hasil sinkronisasi.

Selanjutnya evaluasi pada proses *resulting* dan *implementing*. Evaluasi pada proses ini cukup kompleks karena harus menganalisis tingkat relevansi dari hasil sinkronisasi. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap objek dari implementasi hasil kajian.

Aspek yang dievaluasi kedua yaitu aspek alat (instrumen) yang digunakan. Pada aspek ini, hal yang perlu dievaluasi yaitu tingkat *readability*, *comprehension*, dan *absorption*. Tingkat *readability* merupakan ukuran keterbacaan instrumen dari segi pemahaman pengguna instrumen dan kemudahan pengguna instrumen dalam menggunakan instrumen. Seperti contoh evaluasi pada setiap format yang digunakan untuk menjangkau data seperti pedoman wawancara, kisi-kisi survei, atau butir angket. Pada tingkat *comprehension* yaitu tingkat daya pemahaman dalam mencari data menggunakan instrumen tersebut. Selanjutnya yaitu *absorption* yang merupakan tingkat ketertarikan data di lapangan oleh instrumen.

Aspek yang perlu dievaluasi selanjutnya yaitu aspek hasil. Aspek ini merupakan muara dari arah sinkronisasi program bidang keahlian di SMK. Pada aspek hasil, hal yang perlu dievaluasi yaitu keberhasilan implementasi, relevansi hasil sinkronisasi, dan *problem-solving*. Pada keberhasilan implementasi, perlu dievaluasi terkait kesesuaian target dan sasaran program tersebut. Hal itu perlu dilakukan karena untuk mengetahui efektif tidaknya hasil program sinkronisasi terhadap objek program. Selanjutnya yaitu relevansi hasil sinkronisasi dan *problem-solving*. Kedua bagian aspek tersebut dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan program sinkronisasi. Setelah implementasi hasil perlu dilakukan analisis ketercapaian *problem-solving* dalam menyelesaikan permasalahan terkait bidang keahlian di SMK.

## B. Pihak yang Mengevaluasi

Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi ditetapkan bersama oleh tim sinkronisasi bidang keahlian di SMK. Untuk menjamin objektivitas tim evaluasi yang ditunjuk harus menggunakan instrumen evaluasi, merumuskan teknik evaluasi dan menetapkan prosedur evaluasi. Pihak yang mengevaluasi meliputi Direktorat PSMK, LPTK, LPMP, perwakilan Pemprov., dan perwakilan SMK. Pihak tersebut merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK. Direktorat PSMK dibantu LPTK melakukan evaluasi menyeluruh sejak awal hingga akhir penyelenggaraan. Hal itu dikarenakan lembaga tersebut merupakan pemegang amanah langsung dari Kemendikbud. Tugas dari masing-masing pihak yang mengevaluasi dijelaskan pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Tugas Pihak yang Mengevaluasi**

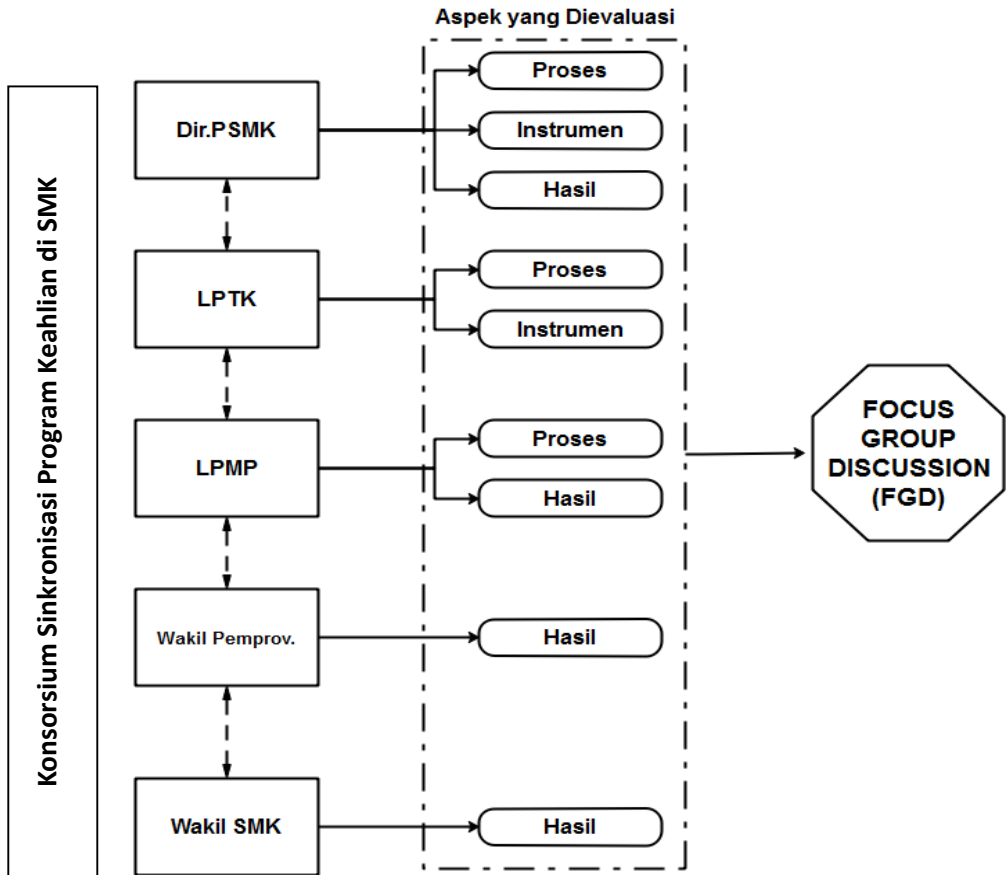
No.	Pihak yang Mengevaluasi	Aspek yang Dievaluasi
1	Direktorat PSMK	- Proses - Instrumen - Hasil
2	LPTK	- Proses - Instrumen
3	LPMP	- Proses - Hasil
4	Wakil Pemprov.	- Hasil
5	Wakil SMK	- Hasil

## C. Strategi Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dilakukan dalam tiga tahap. Tahap awal, tengah, dan akhir program. Pada tahap awal dilakukan setelah perencanaan selesai. Pada tahap ini evaluasi difokuskan untuk mendalami hasil *action plan* yang dibuat oleh tim sinkronisasi. Evaluasi tahap tengah

dilakukan ketika program sedang dilaksanakan dilakukan, sedangkan evaluasi akhir dilakukan setelah program selesai dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan melakukan pembahasan hasil analisis data melalui *Focus Grup Discussion* (FGD) yang melibatkan semua unsur pelaksana program.

Strategi pelaksanaan evaluasi dan monitoring dimulai dari kordinasi antar pelaksana evaluasi. Pelaksana evaluasi meliputi Dir.PSMK, LPTK, LPMP, wakil Pemprov., dan wakil SMK. Kordinasi dilakukan untuk menentukan instrument yang digunakan dan target dari evaluasi program tersebut. Pada masing-masing pelaksana melakukan *focus* evaluasi kepada aspek tujuan evaluasi masing-masing. Selanjutnya dilakukan FGD untuk melakukan *merging* hasil evaluasi program. Strategi pelaksanaan evaluasi dijelaskan pada Gambar 5.2.



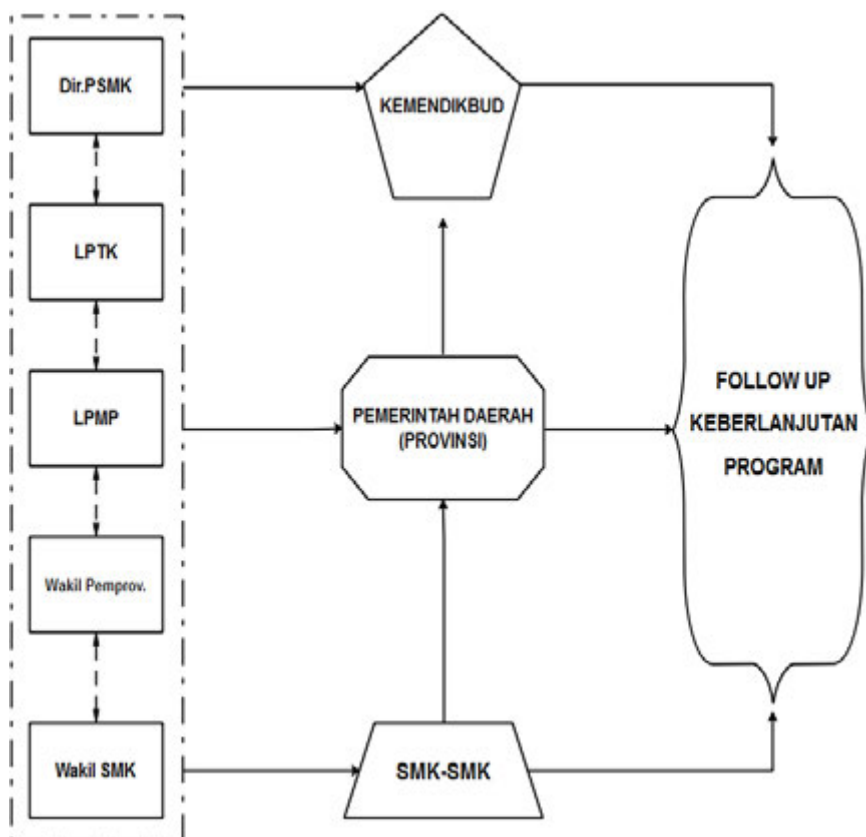
Gambar 5.2 Strategi Pelaksanaan Evaluasi

#### D. Pelaporan Hasil Evaluasi

Semua hasil evaluasi pelaksanaan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK dilaporkan kepada pemerintah daerah (provinsi). Laporan dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi,

termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK.

Pelaporan hasil evaluasi program sinkronisasi bidang keahlian di SMK ditujukan pada tiga lembaga utama. Lembaga tersebut meliputi Kemendikbud, Pemerintah Daerah (Provinsi), dan SMK-SMK. Selanjutnya, ketiga lembaga tersebut melakukan *follow-up* dan menentukan keberlanjutan program tersebut untuk periode berikutnya. Skema pelaporan hasil evaluasi disajikan pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Pelaporan Hasil Evaluasi

## PENUTUP

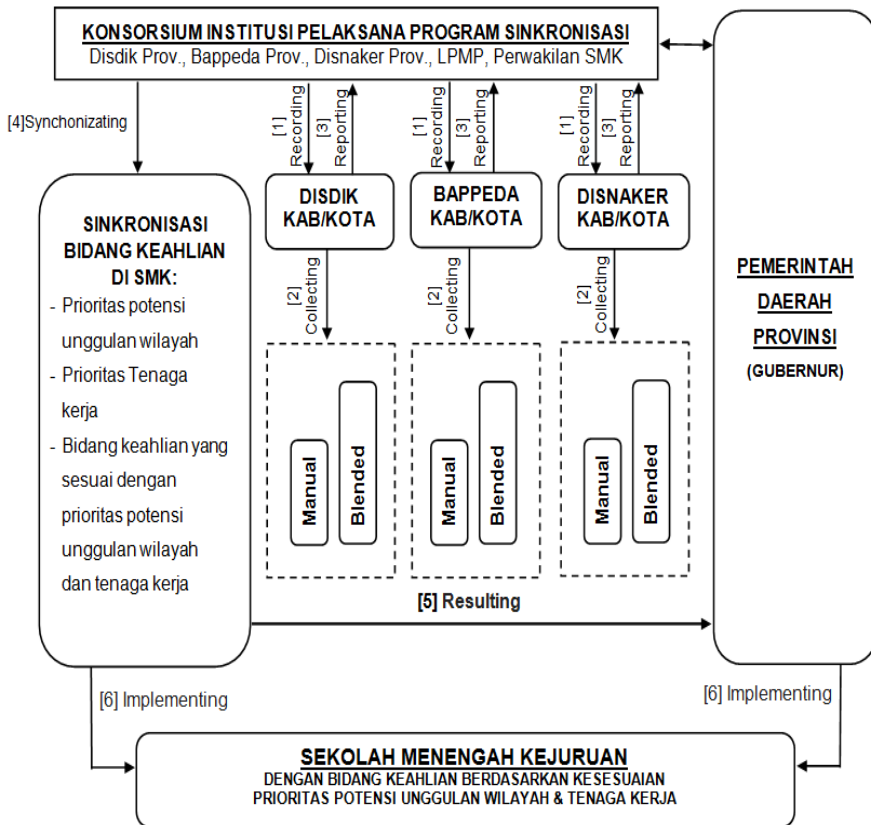
Pada dasarnya panduan pelaksanaan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK merupakan salah satu upaya proses sinkronisasi program-program pengembangan SMK untuk meningkatkan relevansi dan kualitas program, proses, dan hasil/luaran pendidikan di SMK. Hal itu menjadi penting mengingat keberadaan SMK dan tenaga kerja di setiap provinsi saat ini masih banyak yang belum relevan dengan prioritas potensi unggulan wilayah.

Panduan program sinkronisasi bidang keahlian di SMK ini secara singkat meliputi: (a) konsorsium dan mekanisme penyelenggara program sinkronisasi, (b) institusi yang terlibat dalam program sinkronisasi, dan (c) prosedur pelaksanaan sinkronisasi program.

### *Konsorsium dan Mekanisme Penyelenggara Program Sinkronisasi*

Penyelenggara program sinkronisasi bidang keahlian di SMK melibatkan konsorsium penyelenggara program. Konsorsium merupakan institusi yang berwenang melaksanakan program sinkronisasi secara nasional. Konsorsium program sinkronisasi bidang keahlian di SMK disajikan pada Gambar 6.1.

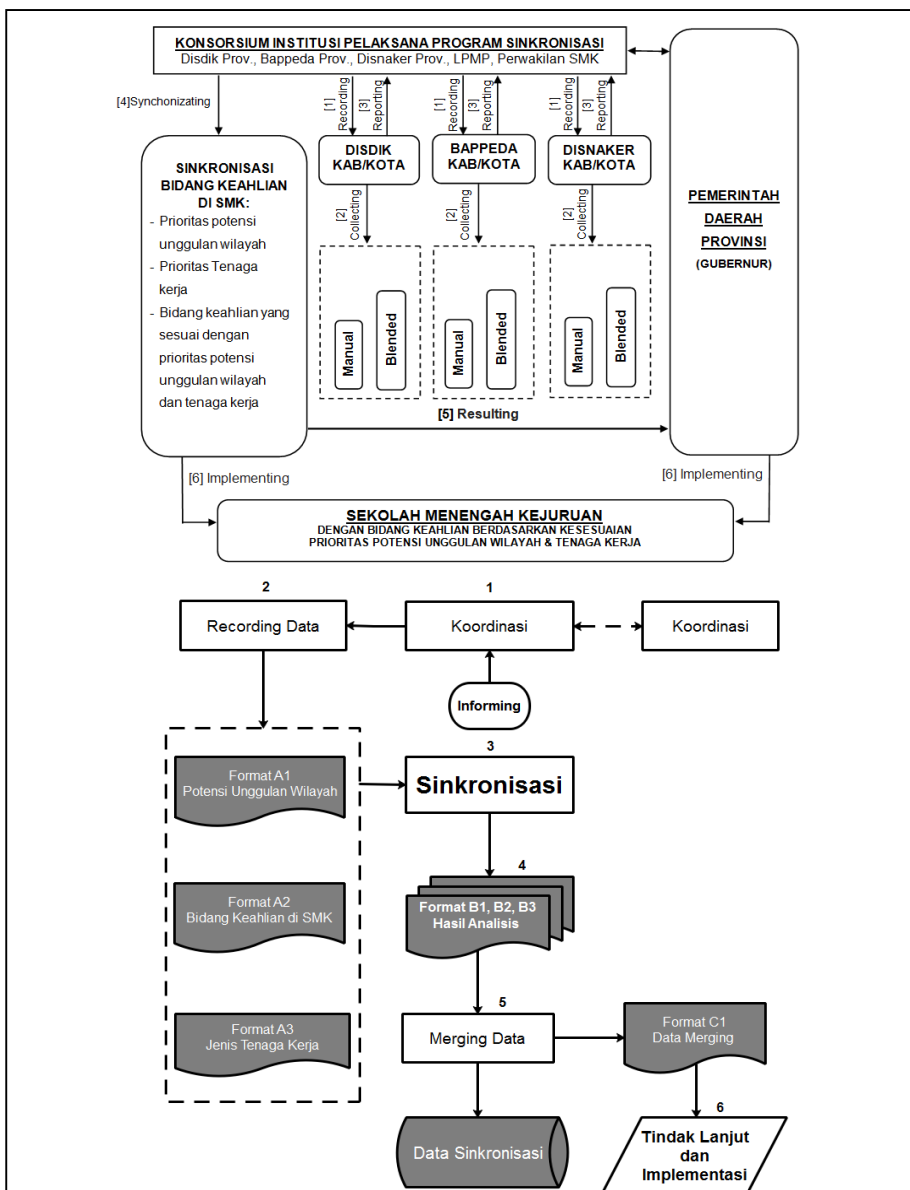




**Gambar 6.2** Institusi yang Terlibat pada Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

#### *Prosedur Pelaksanaan Sinkronisasi Program*

Prosedur sinkronisasi dimulai dengan mengidentifikasi program kerja beserta perangkat pendukung sinkronisasi yang berbentuk studi pendahuluan berupa observasi awal terhadap pemetaan wilayah unggulan yang kemudian dijadikan rancangan terhadap sinkronisasi program. Selanjutnya, Kerjasama berupa konsorsium menggali dan memetakan permasalahan potensi unggulan wilayah yang kemudian saling berkordinasi untuk menentukan kebutuhan bidang keahlian SMK di setiap wilayah Indonesia. Proses sinkronisasi tersebut dilakukan dengan analisis data melalui manual dan *blended*. Prosedur pelaksanaan sinkronisasi disajikan pada Gambar 6.3.



Gambar 6.3 Prosedur Pelaksanaan Program Sinkronisasi Bidang Keahlian di SMK

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Muhammad. 2016. *Pertanian Lahan Gambut, Potensi dan Kendala*. Kanisius. Jurnal Ekonomi: Bandung. Vol 4, No 2, Hal 77 – 78
- Altin, D., Dony Yanuar. 2016. *Inventarisasi Potensi Sosial Ekonomi Sebagai Arah Kebijakan Pengembangan Wisata Bahari Pada Masyarakat Pesisir Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Belitung*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora. Vol 6, No.1, Hal. 405-415
- Anggari, R., Zulfan, Husaini. 2016. *Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah: Aceh. Vol. 1, No. 1, hal. 28-38
- Anjar, Rahma Dian, and Imam Prakoso. 2016. *Penanaman Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 1 No 192, hal 211-224.
- Ansofino. 2015. *Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Dan Tantangan Perekonomian*. Journal of Economic and Economic Education: Sumatera Utara. Vol.3 No.2 hal.110-123.
- Anwar, M. K. R. 2014. *Analisis Peranan Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Provinsi Jawa Timur: Pendekatan Input Output*. Skripsi: Universitas Jember.
- Ardhan Abd. 2015. *Keberlanjutan Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat, Tanpa Tambang Nikel.(Studi di Pulau Gebe Propinsi Maluku Utara)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis: Makasar, Vol III No 70, hal 100 - 102.
- Arends, R. I. 2007. *Learning to Teach*. Seventh edition. New York: McGraw Hill Companis, Inc. Terjemahan Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto. 2008. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Argote, Linda. 2015. An Opportunity for Mutual Learning between Organizational Learning and Global Strategy Researchers: Transactive Memory Systems. *Global Strategy Journal*, 5(2): 198–203.
- Arida, A., Zakiah, Julaini. 2015. *Analisis Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh*. Agrisep: Aceh. Vol. 16. No. 1, hal. 66-78.

- Astuti, N. K. D., Indrajaya, I. G. B. 2016. *Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Inflasi Dan Kurs Dollar Amerika Serikat Terhadap Nilai Ekspor Kerajinan Bambu Provinsi Bali*. EE-Jurnal EP Unud. Vol. 5, No.2, hal. 216-235
- Ayu, L. N. F. N., Wiagustini, L. N. P. 2016. *Potesi Ekonomi Daerah Provinsi Bali*. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 12, hal. 7528-7554
- Azis, A., Basri A. Bakar, A.A. Rahmianna. 2013. *Keragaan Beberapa Varietas Unggul Kacang Tanah Di Lahan Gambut Di Provinsi Aceh. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi: Aceh*. Hal. 327-332
- Bambang, Agus. 2014. *Performance of Agricultural Development In the Implementation Budget of Assistance in South Kalimantan Province*. CIFOR Journal. Vol 5. No 3, Hal 80 – 88.
- Berg, E. V. D. 1991. *Miskonsepsi Fisika dan Remediasi*. Salatiga: Universitas Kristen SatyaWacana.
- Berg, Van den,. 1979. *Menggambar dan membaca gambar teknik mesin untuk SMK*. Jakarta: PT Bharata.
- Bloom, B. S. 1981. *Taxonomy of Education Objectives*. Handbook I: Cognitive Domain. New York: McKay.
- Bloom. 1976. *Human Characteristik and school learning*. New York: MC Graw Hill Book Company.
- Bodner, G.M. 1986. Constructivism: A Theory of Knowledge. *Journal of Chemical Educatins*, 10 (1): 873-878.
- Bottiglione, Francesco. 2014. Energy Consumption of a Battery Electric Vehicle with Infinitely Variable Transmission. *Energies Journal*, 1(7): 317-337.
- Buaton, K. W. S., Heru Purwadio. 2015. *Kriteria Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba Parapat, Sumatera Utara*. Jurnal Teknik ITS: Surabaya. Vol. 4, No.1
- Buzan, Tony. 2012. *Panduan Mind Mapping untuk Pendidikan*. Bandung: Pustaka Mega.
- Chattopadhyay, A. 2005. Understanding of Genetic Information in Higher Secondary Students in Northeast India and the Implications for Genetics Education. *Cell Bio Educ*. 4(1): 97-104.

- Corema, D. 2010. *Pendekatan Baru Genetik dari Pendekatan Sejarah ke Pendekatan Konsep*. Makalah disajikan pada Seminar Nasional MIPA Universitas Negeri Malang, Malang, 13 Oktober.
- Corte, Erik. 2015. *Instructional psychology. Elsevier: International encyclopedia of the social and behavioral sciences, 12(2): 201-204.***
- Creswell. 2012. *Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran. Jakarta: Pustaka Karya.***
- Crowe M. & Sheppard L. 2011. Mind mapping research methods. *Springer Science+Business Media. Qual Quant, 1(46):1493–1504.*
- Delima, M., Abubakar Karim, M. Yunus. 2015. *Kajian Potensi Produksi Hijauan Pakan pada Lahan Eksisting dan Potensial untuk Meningkatkan Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Aceh Besar*. Agripet: Aceh. Vol 15, No. 1, hal. 33-40.
- Dimiyat dan Mudjiono. 2002. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djaenudin, D., Y. Sulaeman, and A. Abdurachman. 2014. *Pendekatan pewilayahan komoditas pertanian menurut pedoagroklimat di Kawasan Timur Indonesia*. Jurnal Litbang Pertanian Vol. 21.1, Hal 1-10
- Elmaksoud, Eid O. A. Abd. 2011. Investigation of Self Excited Torsional Vibrations of Different Configurations of Automatic Transmission Systems during Engagement. *Scientific Research, 1(3): 1171-1181.*
- Erna, Taufik, Muh. 2014. *Strategi pengembangan agribisnis sayuran di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* Vol. 31.2 Hal. 1-10
- Evita, A., JWW, and S. K. M. Abidillah Musyid. 2015. *Pengaruh pelatihan terhadap pengetahuan, keterampilan, kepatuhan kader posyandu dalam menerapkan standar pemantauan pertumbuhan balita di Kota Bitung, Sulawesi Utara*. Diss. Jurnal Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta. Vol 1, No 112, Hal 34 -36
- Fadli, Nugraha, Budi, and Enjah Rahmat. 2016. *Status perikanan hute (pole and line) di Bitung, Sulawesi Utara*. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia Vol. 14.3, Hal. 311-318.
- Fatma, M. Maryam. 2016. *Adaptasi Varietas Unggul Baru Padi Sawah Seram Timur Mendukung Ketahanan Pangan Wilayah*. Jurnal Pertanian Agros Vol. 15.1, Hal. 160-165

- Gangwar, G., K. 2014. Study Of Closed -Circuit Hydraulic Energy Regenerative System For Hydrostatic Transmission Drive Using Hydraulic Accumulator. *International Journal Of Research In Aeronautical And Mechanical Engineering*, 2(1): 1-10.
- Gunarto, Anton. 2017. *Penataan Lingkungan Demfarm Kakao Berbasis Masyarakat Dan Agrowisata Berkelanjutan Di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan*. *Jurnal Teknologi Lingkungan* Vol. 18.1, Hal 9-18
- Habib, F. L. 2015. *Strategi Pengembangan Objek Wisata Kawah Putih Tinggi Raja Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun Sumatera Utara*. *JOM FISIP: Riau*. No. 2 Vol. 2, hal. 1-13.
- Hamdani, M. 2016. *Analisis Motivasi Wisatawan Yang Menginap Di Daerah Wisata Tuktuk Samosir Sumatera Utara*. *JIPSA: Aceh*. Vol. 16, No. 25, hal.43-54.
- Hamsani, Devi Valeriani. 2014. *Blue Ocean Strategy Pengembangan Pariwisata Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Hal. 41-55
- Hartarto, R. B. 2016. *Identifikasi Potensi Ekonomi Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 17, No. 1, hal.16-21
- Hendri, Sulaeman, and A. Abdurachman. 2016. *Pendekatan pewilayahan komoditas pertanian menurut pedoagroklimat di Kawasan Timur Indonesia*. *Jurnal Litbang Pertanian* Vol 21.Hal. 1-10
- Herawati, T., Christina L Rudatin dan Djuni Akbar. 2014. *Potensi Kota Bandung Sebagai Destinasi Incentive Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif*. *Epigram*. Vol.11 No.2 hal. 95-102
- I Adnyana, I. B. M. Y., Rissal Efendi. 2014. *Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Persebaran Lokasi Obyek Pariwisata Berbasis Web Dan Mobile Android*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Vol. 5, No. 1, hal. 9-16.
- Iqbal, M., Eka Intan Kumala Putri dan Bahruni. 2014. *Nilai Ekonomi Total Sumberdaya Bambu Di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 11 No. 2, hal. 91-105

- Ivanesthi, I. R., Sri Nurhatika, Anton Muhibuddin. 2016. *Potensi Fermentasi Etanol Isolat Yeast Tanah yang Diisolasi dari Kabupaten Jember*. Jurnal Sains Dan Seni ITS: Surabaya. Vol. 5, No.2.
- Junaidi, Amri Amir, Hardiani. 2014. *Potensi Klaster Agroindustri Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah: Jambi. Vol. 2 No. 1, hal. 9-20
- 3 Khairullina, Elmira Robertovna. 2015. Features of the Programs Applied Bachelor Degree in Secondary and Higher Vocational Education. *Asian Social Science*, 11(4): 213-217.
- Lanylayla Kekenusa, John S. 2017. *Analisis penentuan musim penangkapan ikan cakalang (Katsuwonus pelamis) di perairan sekitar Bitung Sulawesi Utara*. Jurnal Protein Vo. 13.1, Hal 25 -26.
- Mahadeokar S., Choudhary A. 2014. A Review On "Finite Element Analysis Of Chassis Using Ansys". *International Journal Of Research In Aeronautical And Mechanical Engineering*, 2(10): 16-21.
- Makwan, Romesh. 2014. Analysis of Auto-Gear Shifting Mechanism on different Load Conditions. *International Journal Of Engineering Sciences & Research Technology*, 3(8): 737-739.
- Manik, T., Inge Lengga Sari. 2014. *Analisis Pengaruh Industri Maritim Melalui Transportasi Perhubungan Laut, Pariwisata Bahari, Perikanan Tangkap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Aset*. JEMI VOL.5 No.2
- BAB II Misbah, Zainun. 2015. Teacher Interpersonal Behaviour And Student Motivation In Competence-Based Vocational Education: Evidence from Indonesia. *Teaching and Teacher Education*, 2(50): 79-89.**
- Mohamed, S., Eid. 2014. Experimental Investigation and Theoretical Model Approach on Transmission Efficiency of the Vehicle Continuously Variable Transmission. *American Journal of Vehicle Design*, 2(1): 43-52.
- Mukhadis, A. 2013. *Evaluasi Bidang Pembelajaran Bidang Teknologi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mukhadis, A. 2013. *Kemampuan Emulasi Sebagai Orientasi Pendidikan Entrepreneurship Di Abad Pengetahuan*. Cakrawala Pembelajaran

Berkualitas Di Indonesia (hlm. 284-311). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian dan Kebudayaan.

Mukhadis, A. 2016. Pembelajaran Terintegrasi Model Shared Berbasis Gallery Project Matakuliah Metodologi Penelitian Dan Skripsi Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Mempercepat Penyelesaian Studi Mahasiswa Kependidikan. *Kontribusi Hasil Penelitian Untuk Peningkatan Kualitas SDM*, 1(1): 407-418.

Mutholib, Abdul. 2014. *Potensi Sumber Daya Manusia di Nusa Tenggara Barat* " Jurnal Ekonomi Volume 3. Hal 35 – 36

Nadjmi, N., Budi Prayitno. 2014. *Model Tata Ruang Destinasi Pariwisata Kepulauan Di Kepulauan Riau*. Universitas Gadjah Mada.

Nadjmi, N., Budi Prayitno. 2014. *Pulau Batam Sebagai Kawasan Destinasi Wisata Terpadu di Kepulauan Riau*. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta. Hal. 1-9

**BAB III Novack, Miriam. 2015. Learning from Gesture: How Our Hands Change Our Minds. Educational Psychology Review, 27(3): 405-412.**

Perizadel, B., Andy Mulyana. 2014. *Strategi Percepatan Pengembangan Industri Hilir Karet Dan Kelapa Sawit Di Sumatera Selatan*. Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya: Palembang. Vol.12, No.2, hal.75-138

Pustikawati, M., Yar Johan, Dede Hartono. 2016. *Kajian Ekosistem Terumbu Karang Untuk Pengembangan Ekowisata Bahari Pulau Tikus Bengkulu*. Jurnal Enggano: Bengkulu. Vol. 1, No. 1, hal. 113-119

Putra, Andika Bagus Nur Rahma. 2016. Pengaruh Metode Peta Pikiran Terhadap Hasil Belajar Siswa SMKN 6 Malang. *Prosiding: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Pembelajaran*, 1(1): 110-119.

Rachmat, M. 2014. *Potensi Lahan Pertanian Bagi Pengembangan Palawija Di Lampung*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi: Bogor. Hal.31-37

Rahmatulloh. 2017. *Dinamika Kependudukan Di Ibukota Jakarta*. Genta Mulia. Vol. 8, No. 2, hal. 54-67

- Ratu, C., I Made Adikampanaa. 2016. *Strategi Pemasaran Desa Wisata Blimbingsari Kabupaten Jembrana*. Jurnal Destinasi Pariwisata: Bali. Vol. 4 No. 1, hal. 60-67.
- RAZIAH. 2016. *Strategi Promosi Objek Wisata Mangrove Sungai Carang Dalam Meningkatkan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah Kota Tanjungpinang*. UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI. Thesis: Tanjungpinang.
- Rosda, Hana Yuliani. 2017. *Peran Pusat Pelatihan Pertanian Dan Perdesaan Swadaya (P4s) Menara Tani Bakti Mandiri Dalam Peningkatan Pengetahuan Dan Pendapatan Petani Padi*." Jurnal Agrosience Vol. 6.2, Hal 1- 10.
- Rusdiana, S., L. Praharani dan U.Adiati. 2014. *Prospek Dan Strategi Perdagangan Ternak Kambing Dalam Merebut Peluang Pasar Dunia*. Agriekonomika: Madura. Vol. 3, No. 2, hal. 2013-222
- Sahidu, Arifuddin. 2015. *Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat*." Jurnal Sains dan Teknologi Vol 2, Hal 13 -16
- Sari, D. M. 2016. *Analisis Permasalahan-Permasalahan Usaha Kecil Dan Menengah Sektor Jasa Di Kota Bengkulu*. Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan: Vol. 06. NO. 03, hal. 60-71
- Setiawan, Adi Dian. 2017. *Fenomena batu akik di papua dan ancaman kepunahan artefak kapak batu lonjong (gemstone phenomenon in papua and threat of extinction stone axe artifact)*. Jurnal Penelitian Arkeologi Papua Vol. 7.1, Hal 35-45
- Setiawati, A. R. 2016. *Perencanaan Penggunaan Lahan Komoditas Unggulan Perkebunan Di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat*. Thesis. ITB: Bogor.
- Shaw, K. R. M., Horne, K. V., Zhang, H., Joan Bounghmas, J. 2008. *Essay Contest Reveals Misconceptions of High School Students in Genetics Content*. *Gebetics*, 178 (3): 1157-1168.
- Sirappa, M. P. 2016 *Prospek pengembangan sorgum di Indonesia sebagai komoditas alternatif untuk pangan, pakan, dan industri*. *Jurnal Litbang Pertanian* Vol. 22.4, Hal 133-140
- Sitorus, S. R. P., Bima Wahyu Widodo, Dyah Retno Panuju. 2013. *Identifikasi Komoditas Basis Tanaman Pangan Dan Arah*

- Pengembangannya Di Provinsi Lampung. *Jur.Tanah Lingk.* Vol. 15, No. 1, hal. 29-38
- Situmorang, Krismawati, Amik, M. Sabran. 2016 *Pengelolaan sumber daya genetik tanaman obat spesifik kalimantan tengah.* *Buletin Plasma Nutfah* Vol. 12.1, Hal 16-23
- Smith, Andy. 2015. Towards Inclusive Learning Environments (TILE): Developing the 'Roadmap for the Inclusion of Students with Special Educational Needs in Vocational Education and Workplace Settings'. *Vocational Training and SEN*, 30(2): 150-160.
- Soebagiyo, D., Arifin Sri Hascaryo. 2015. *Analisis Sektor Unggulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Jawa Tengah.* Univesity Research Colloquium: Semarang. hal. 138-151
- Stevanus, C. T., Sahuri. 2014. *Potensi Peningkatan Penyerapan Karbon Di Perkebunan Karet Sembawa, Sumatra Selatan.* *Widyariset.* Vol. 17, No. 3, hal.363–372
- Suharjo, O. D. M., Eko Budi Santoso. 2014. *Keterkaitan Sektor Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.* *Jurnal Teknik POM ITS: Surabaya.* Vol. 3, No. 2
- Sukamay, M., Agus Susanto. 2014. *Pengembangan Konsep Wilayah Agropolitan Sebagai Strategi Menuju Green City (Studi Kasus Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten).* FMIPA UT. Hal.236-246
- Sumule. 2014. *Model Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Mineral Yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Pengelolaan Lingkungan Mod-ADA Di Kabupaten Mimika, Papua).*" *Jurnal Papua.* Vol 2. Hal 20 – 24
- Suparto, H. 2017. *Pemanfaatan Limbah Kolam Ikan Sebagai Sumber Hara N Bagi Pertumbuhan Dan Hasil Jagung Manis (Jea Mays Saccharata) Di Lahan Gambut."* *Jurnal AGRYPEAT* Vol. 17.2. Hal 61-66
- Sutopo, B. H., D. A. Suriadikarta.2015. *Karakteristik, potensi, dan teknologi pengelolaan tanah Ultisol untuk pengembangan pertanian lahan kering di Indonesia.* *Jurnal Litbang Pertanian* Vol. 25.2, Hal 39-46
- Syafruddin, Setiabudi Agustinus N. Kairupan, A. Negara, J. Limbongan. 2014. *Penataan sistem pertanian dan penetapan komoditas unggulan berdasarkan zona agroekologi di Sulawesi Tengah.* *Jurnal Litbang Pertanian* Vol. 23.2, Hal 61.

- Taufiq, Kartini. 2016. *Penerapan Pola Distribusi Hasil-Hasil Pertanian, Dan Tambang Antara Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kalimantan Selatan Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Regional.*" Jurnal Nasional Vol 3, Hal 30 – 34
- Ulfatin, N. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya.* Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003. *Sistem Pengetahuan Nasional*, (Online), ([http:// www.depdiknas.go.id/ UU RI No 20/2003-Sistem Pengetahuan Nasional, html](http://www.depdiknas.go.id/UU_RI_No_20/2003-Sistem_Pengetahuan_Nasional.html), diakses 18 Juli 2013).
- Wahyuningsih, Rina. 2013. *Potensi dan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Indonesia.* Kolokium Hasil Lapangan. Badan Geologi: Bandung
- BAB IV Wang, Ming-Te. 2015. The Trajectories Of Student Emotional Engagement And School Burnout With Academic And Psychological Development: Findings From Finnish Adolescents. Elsevier: Learning and Instruction, 36(1): 57–65.**
- Wicaksono, Noviarso. 2014. *Survei Potensi Pasir Kuarsa di Daerah Ketapang Propinsi Kalimantan Barat.* Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol 11.2, Hal 30 – 34.
- Widiarti, Kurniawan, Ahmad Yousuf. 2015. *Analisis efisiensi ekonomi dan daya saing usahatani jagung pada lahan kering di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan.* Vol 2, Hal 23 - 24.
- Winarso, Bambang. 2017. *Prospek dan kendala pengembangan agribisnis jagung di propinsi nusa tenggara barat.* Jurnal Penelitian Pertanian Terapan Vol 12.2, Hal 12 – 14
- Yanuar J., Friday Fritriana Nur. 2013. *Pengembangan Prasarana Irigasi untuk Peningkatan Produktivitas Lahan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.* Jurnal Irigasi Vol 8.1, Hal 35-45
- Yusnikusumah, T. R., Sulystiawati, E. 2016. *Evaluasi Pengelolaan Ekowisata di Kawasan Ekowisata Tangkahan Taman Nasional Gunung Leuser Sumatera Utara.* Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol. 27, No. 3, hal. 173-189.
- Yusral, Junaidi, Adi Bakti. 2015. *Klasifikasi Pertumbuhan, Sektor Basis dan Kompetitif Kota Jambi.* Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah: Jambi. Vol. 2 No. 4, hal. 209-216

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1. Format A1

## KOP INSTITUSI

## FORM JUMLAH TENAGA KERJA

Nama Provinsi: .....

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Bidang Kompetensi Tenaga Kerja Andalan	Jumlah Tenaga Kerja 3 Tahun Terakhir (2015-2017)	Keterangan
1.			2015: <input type="text"/> org 2016: <input type="text"/> org 2017: <input type="text"/> org	
2.			2015: <input type="text"/> org <input type="text"/> 2016: <input type="text"/> org <input type="text"/> 2017: <input type="text"/> org	
3.			2015: <input type="text"/> org 2016: <input type="text"/> org 2017: <input type="text"/> org	

4.			2015: <input type="text"/> org <input type="text"/> 2016: <input type="text"/> org <input type="text"/> 2017: <input type="text"/> org
5.			2015: <input type="text"/> org <input type="text"/> 2016: <input type="text"/> org <input type="text"/> 2017: <input type="text"/> org
	Dst.		

....., / /

Ttd.

.....

(NIP.                    )

## Lampiran 2. Format A2

## KOP INSTITUSI

## FORM SMK UNGGULAN BERBASIS POTENSI DAERAH

Nama Provinsi: .....

No	Kabupaten/Kota	Nama SMK	Bidang Andalan (beri tanda -/ untuk yang sesuai)								
			Teknologi dan rekayasa	Tek. Informasi & komunikasi	Kesehatan	Agribisnis & Agro-teknologi	Perikanan & Kelautan	Bisnis & Manajemen	Pariwisata	Seni Rupa & Kriya	Seni Pertunjukan
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Dst.										

....., / /

Ttd.

.....

(NIP. )

## Lampiran 3. Format A3

## KOP INSTITUSI

## FORM POTENSI UNGGULAN PROVINSI DI INDONESIA

Nama Provinsi: .....

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Unggulan Wilayah	Unit Pengelola	Besar Pemasukan ke Provinsi (dalam %)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
	Dst.			

....., / /

Ttd.

.....

(NIP.                    )

## Lampiran 4. Format B1

## KOP INSTITUSI

## ANALISIS POTENSI UNGGULAN MASING-MASING PROVINSI

No	Nama Provinsi	Potensi Unggulan Wilayah	Prioritas Potensi Unggulan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
	Dst.		

....., / /

Ttd.

.....

(NIP.                      )



## Lampiran 5. Format B3

KOP INSTITUSI

## ANALISIS PRIORITAS JENIS TENAGA KERJA

No	Provinsi	Tenaga Kerja Depnaker
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
	Dst.	

....., / /

Ttd.

.....

(NIP.                    )



